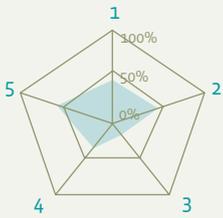


Indeks Tata Kelola Pendidikan Pemerintah Daerah di Indonesia (ILEGI):
Rapor 50 Pemerintah Daerah

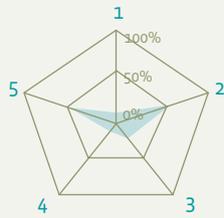
Lampiran Laporan Daerah

Kinerja Pemerintah Daerah dalam Bentuk Jaring Laba-Laba berdasarkan Bidang Strategis (Nilai Sempurna = 100% untuk setiap bidang strategis)

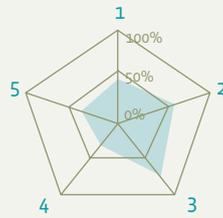
Aceh Barat



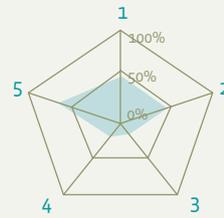
Aceh Barat Daya



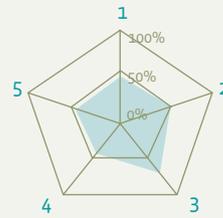
Aceh Besar



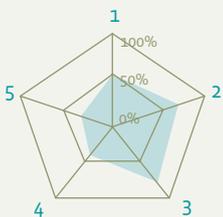
Aceh Tenggara



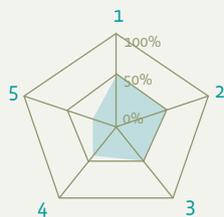
Aceh Utara



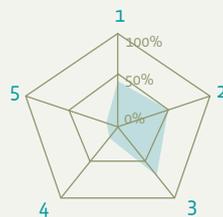
Bangkalan



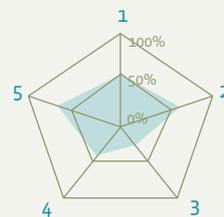
Banjarnegara



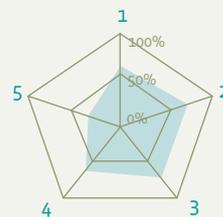
Bireuen



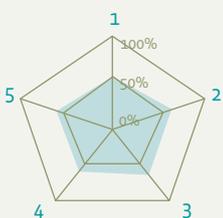
Blora



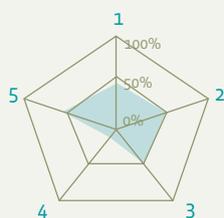
Bojonegoro



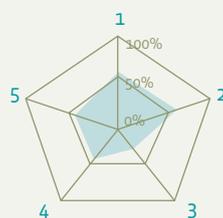
Bondowoso



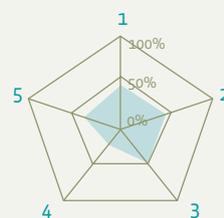
Brebes



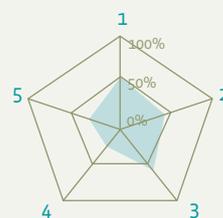
Demak



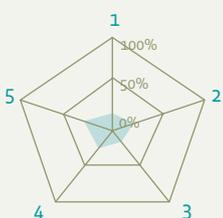
Halmahera Selatan



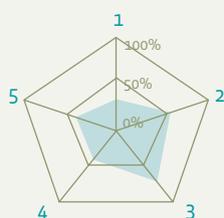
Jayapura



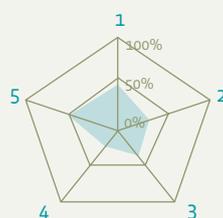
Jayawijaya



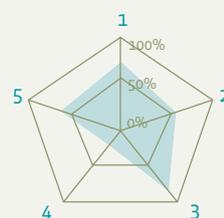
Jombang



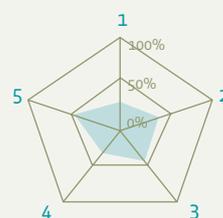
Kaimana



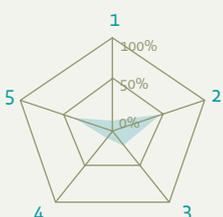
Kebumen



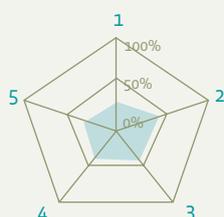
Kepulauan Sula



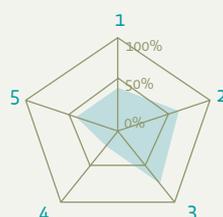
Kotawaringin Timur



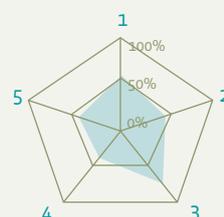
Kulon Progo



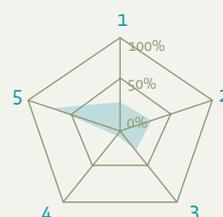
Lhokseumawe



Majene



Mamasa



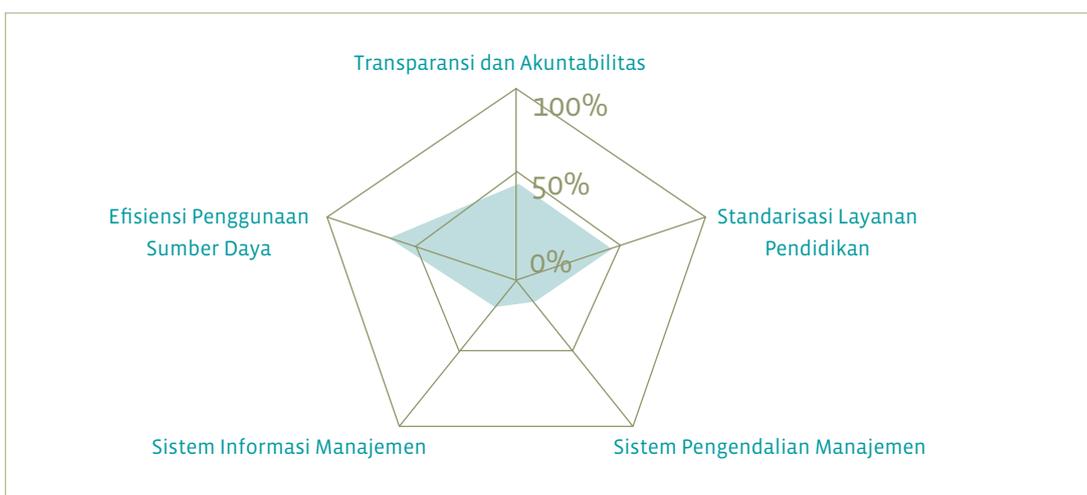
Daftar Isi

2	Aceh Tenggara	102	Jombang
6	Aceh Barat	106	Nganjuk
10	Bireuen	110	Ngawi
14	Aceh Utara	114	Bojonegoro
18	Aceh Barat Daya	118	Bangkalan
22	Nagan Raya	122	Sampang
26	Lhokseumawe	126	Probolinggo (City)
30	Aceh Besar	130	Kotawaringin Timur
34	Purbalingga	134	Seruyan
38	Banjarnegara	138	Palangkaraya
42	Kebumen	142	Majene
46	Purworejo	146	Polewali Mandar
50	Wonosobo	150	Mamasa
54	Wonogiri	154	Kepulauan Sula
58	Sragen	158	Halmahera Selatan
62	Blora	162	Ternate
66	Rembang	166	Kaimana
70	Demak	170	Teluk Wondama
74	Brebes	174	Manokwari
78	Kulonprogo	178	Sorong Selatan
82	Sleman	182	Jayawijaya
86	Pacitan	186	Nabire
90	Trenggalek	190	Paniai
94	Bondowoso	194	Pegunungan Bintang
98	Probolinggo	198	Jayapura

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Aceh Tenggara
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		38.22%	31
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	42.14%	30
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	42.06%	37
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	14.78%	44
4.	Sistem Informasi Manajemen	22.14%	35
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70.00%	3

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

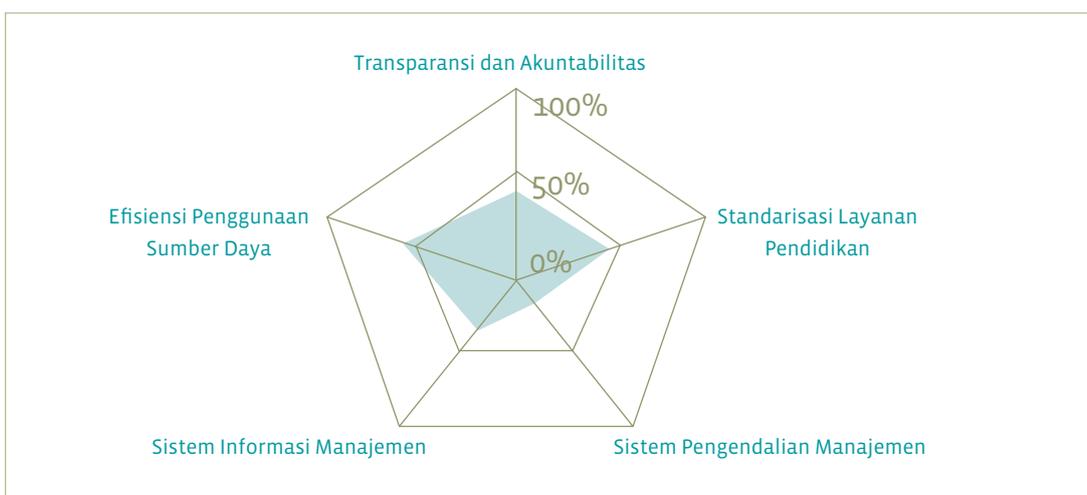
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]	

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Adanya Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Adanya bukti dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Adanya pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Adanya pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Adanya SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Adanya Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Adanya dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Adanya proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Pengendalian Sumberdaya yang Efisien	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Aceh Barat
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		37.07%	33
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	40.48%	36
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	40.81%	39
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	11.61%	49
4.	Sistem Informasi Manajemen	31.64%	25
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60.83%	9

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

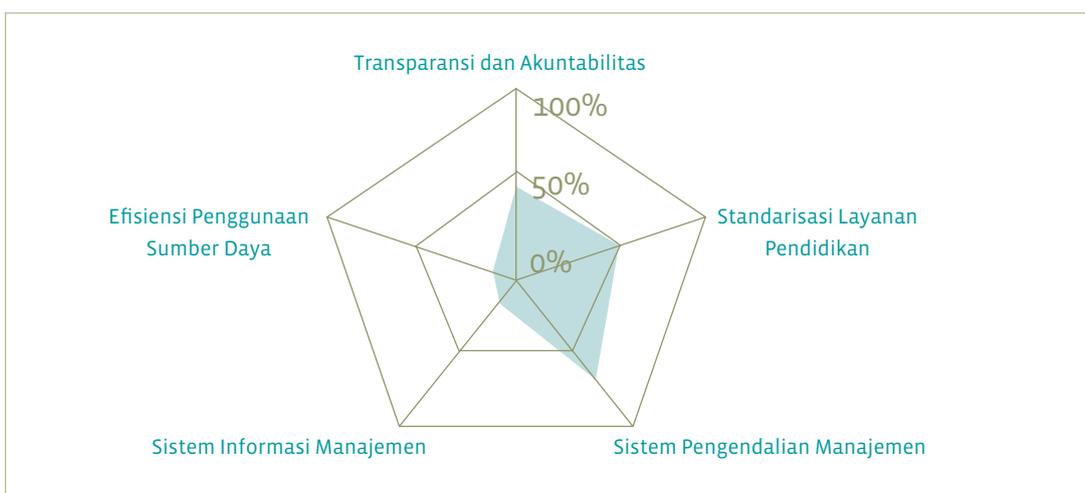
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11] Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1] Adanya Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4] Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5] SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7] Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11] Adanya bukti dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12] Adanya pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14] Adanya pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15] Adanya SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16] Adanya Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Adanya proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3] Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8] Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Bireun
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		37.79%	32
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	40.48%	35
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	48.59%	24
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	68.75%	16
4.	Sistem Informasi Manajemen	15.29%	41
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	15.83%	49

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3, 4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efficient Resource Use	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

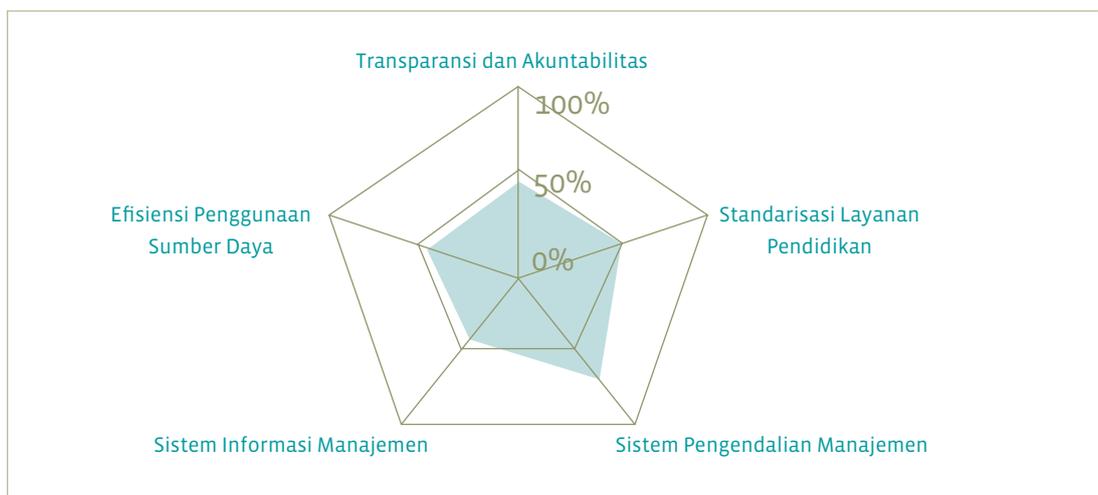
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Adanya bukti dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Adanya SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Sistem Informasi Manajemen	Adanya dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Adanya proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Aceh Utara
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		49.30%	18
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	40.48%	33
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	48.25%	26
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	71.63%	14
4.	Sistem Informasi Manajemen	42.38%	14
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43.75%	19

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

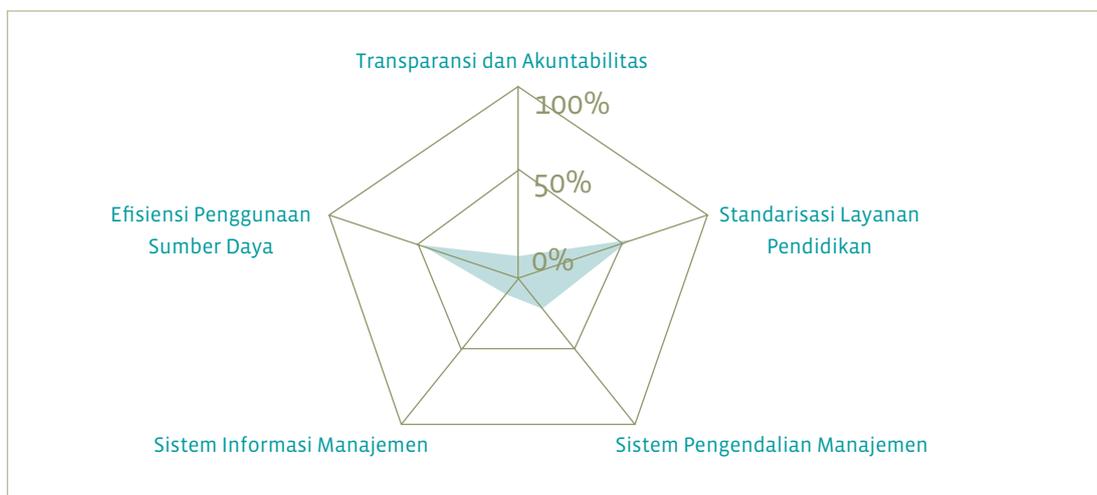
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		70.30%	42
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	10.71%	48
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	61.02%	12
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	19.25%	41
4.	Sistem Informasi Manajemen	8.33%	44
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54.17%	13

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

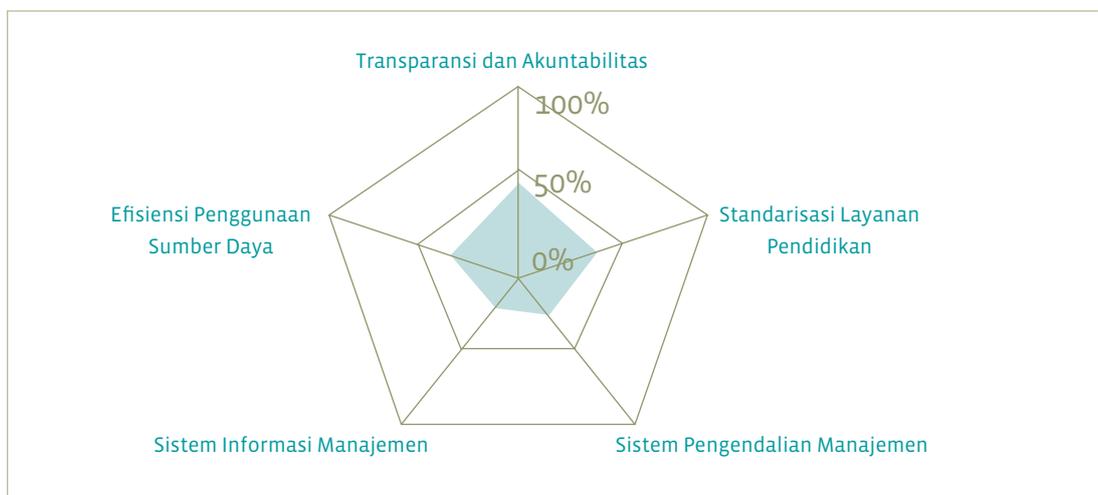
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Nagan Raya
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		31.04%	41
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	42.14%	31
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	29.95%	45
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	27.28%	36
4.	Sistem Informasi Manajemen	20.83%	40
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35.00%	32

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

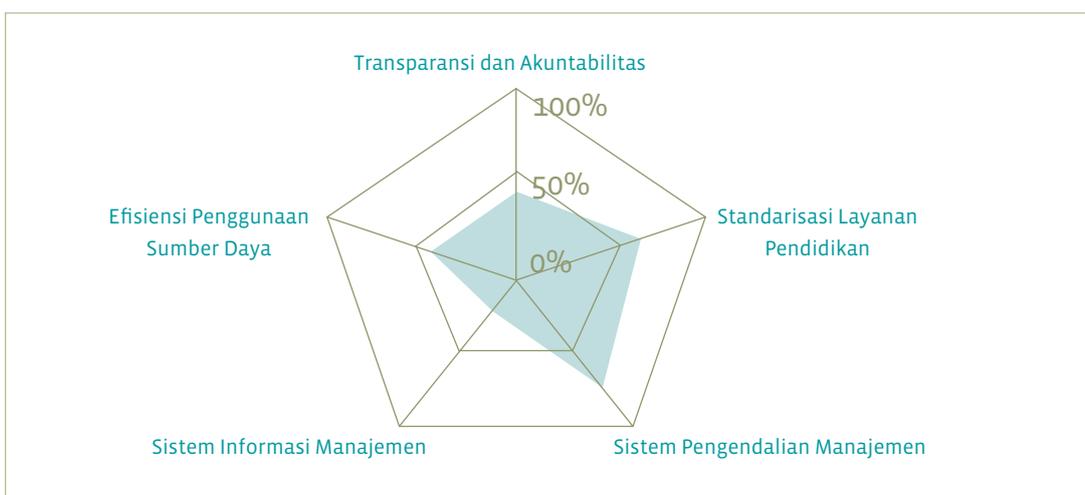
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Lhokseumawe
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		47.06%	22
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	40.48%	34
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	55.36%	17
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	76.09%	10
4.	Sistem Informasi Manajemen	21.70%	36
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41.67%	21

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
Sistem Pengendalian Manajemen	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

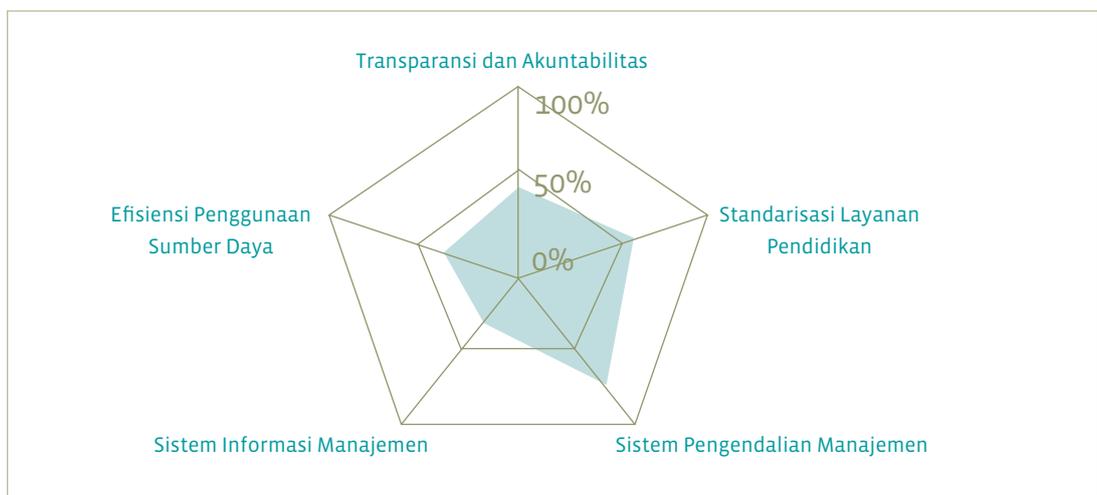
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [2]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [9]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Aceh Besar
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		47.12%	21
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	42.14%	29
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	58.01%	15
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	70.83%	15
4.	Sistem Informasi Manajemen	30.87%	26
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30.87%	34

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

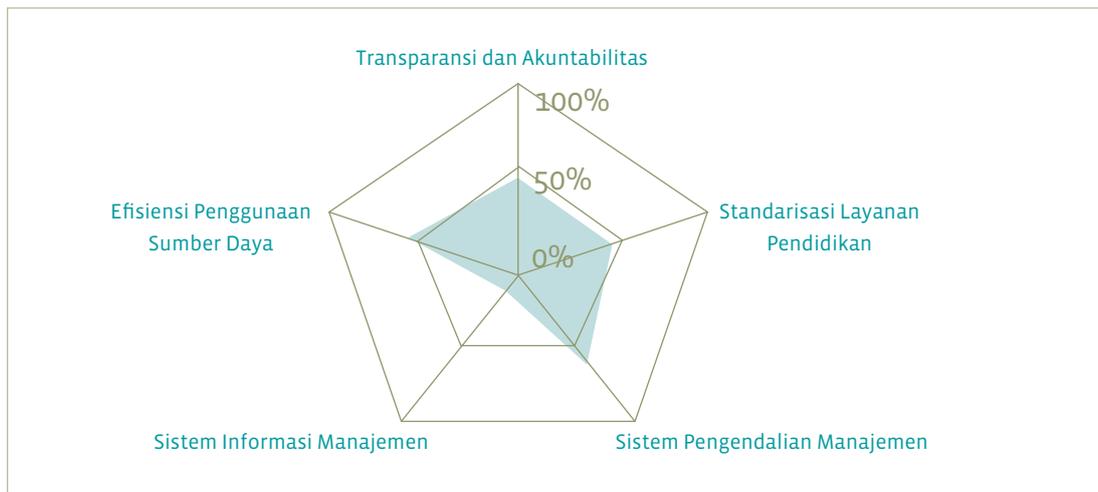
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Purbalingga
Provinsi : Jawa Tengah
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		45.16%	24
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	44.05%	26
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	43.81%	34
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	67.26%	17
4.	Sistem Informasi Manajemen	13.18%	42
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57.50%	12

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

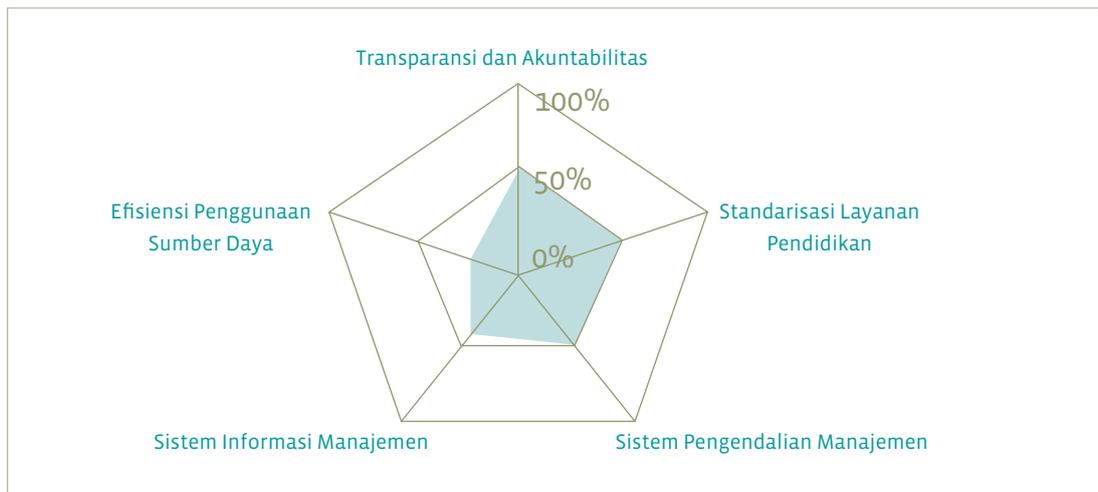
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Banjarnegara
Provinsi : Jawa Tengah
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		41.59%	30
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	49.40%	16
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	47.21%	28
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	48.66%	23
4.	Sistem Informasi Manajemen	41.41%	17
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21.25%	48

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
Standarisasi Layanan Pendidikan	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

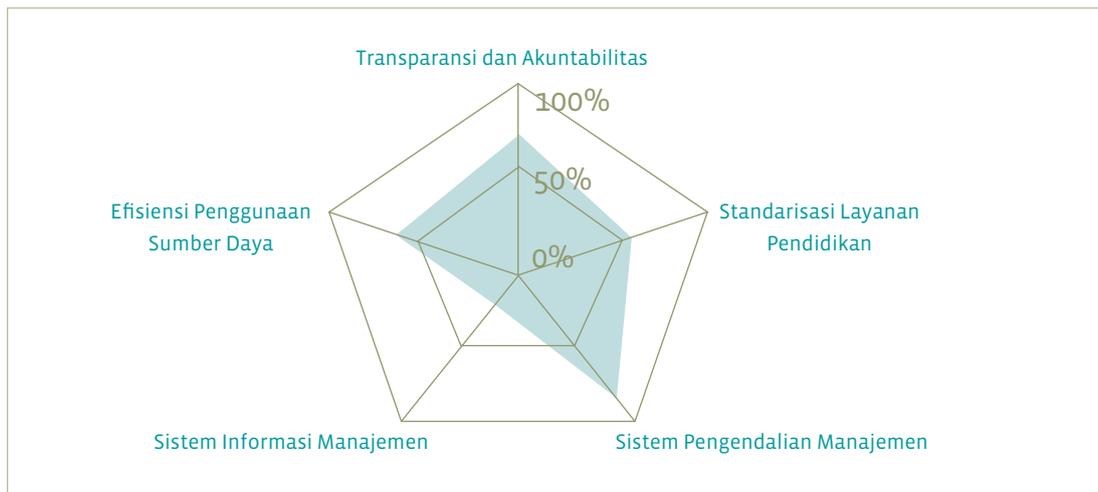
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Kebumen
Provinsi : Jawa Tengah
Kategori : Baik (Hijau)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		60.23%	3
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	75.24%	1
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	54.23%	18
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	84.23%	1
4.	Sistem Informasi Manajemen	20.83%	38
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	66.25%	5

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka Putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

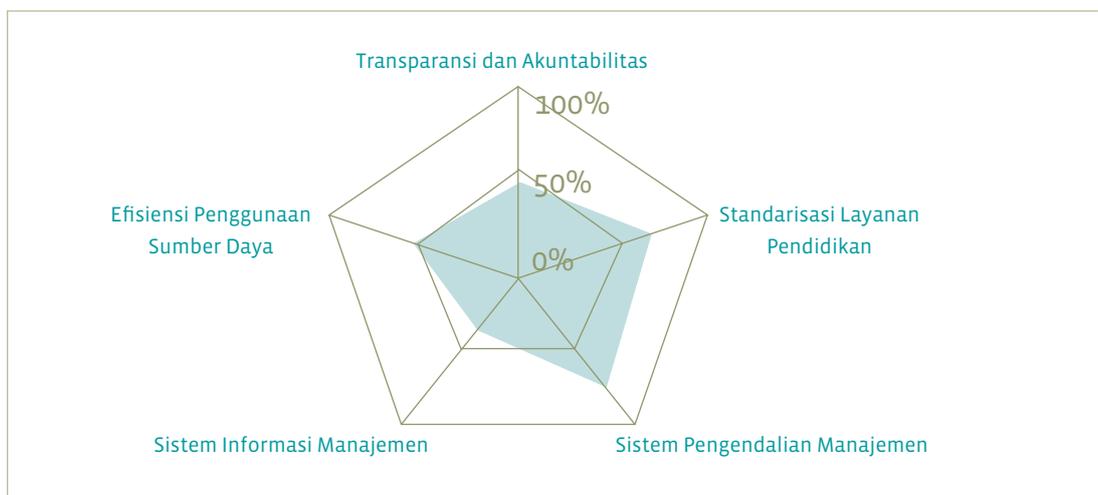
4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Purworejo
Provinsi : Jawa Tengah
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		56.50%	10
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	44.05%	24
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	67.92%	7
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	80.56%	4
4.	Sistem Informasi Manajemen	36.66%	22
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53.33%	14

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

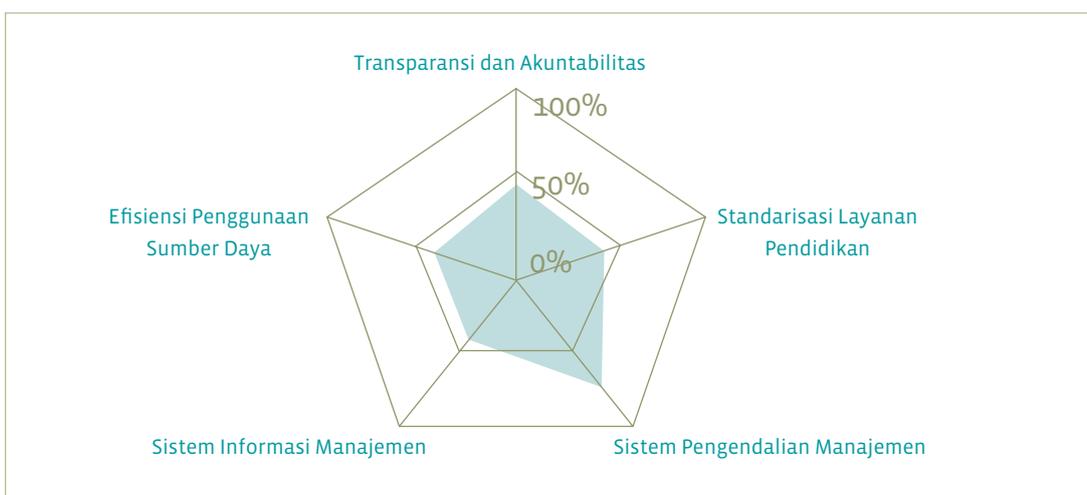
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [9]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Wonosobo
Provinsi : Jawa Tengah
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		47.65%	20
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	44.05%	25
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	37.36%	40
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	76.39%	9
4.	Sistem Informasi Manajemen	41.30%	18
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39.17%	27

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan anggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

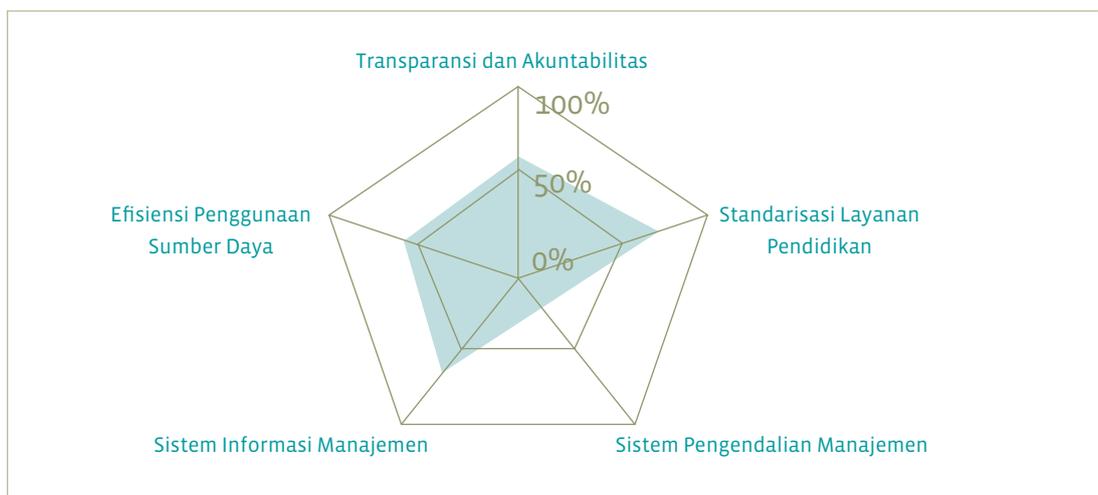
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Wonogiri
Provinsi : Jawa Tengah
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		59.15%	5
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	62.98%	3
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	80.95%	1
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	23.71%	39
4.	Sistem Informasi Manajemen	64.78%	3
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	63.33%	7

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

56

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

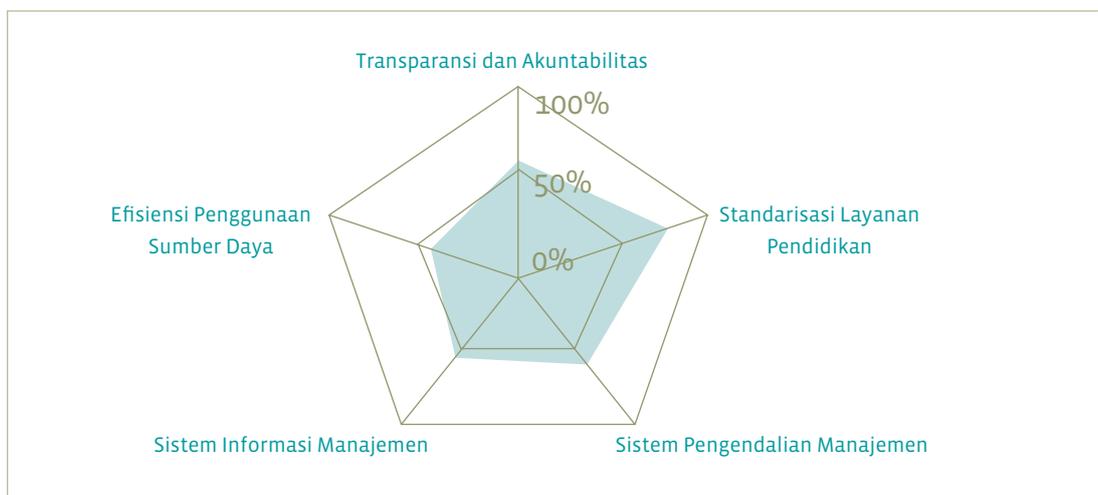
4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Sragen
Provinsi : Jawa Tengah
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		59.07%	6
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	55.83%	9
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	80.36%	2
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	59.13%	20
4.	Sistem Informasi Manajemen	55.04%	6
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45.00%	18

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

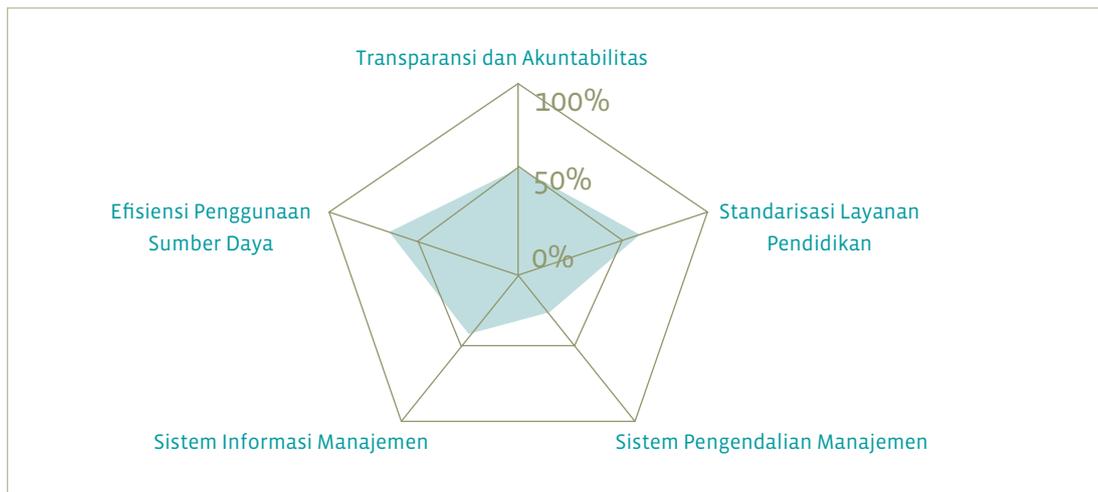
4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Blora
Provinsi : Jawa Tengah
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		51.21%	14
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	52.98%	12
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	60.69%	14
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	29.37%	33
4.	Sistem Informasi Manajemen	43.46%	12
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69.58%	4

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]

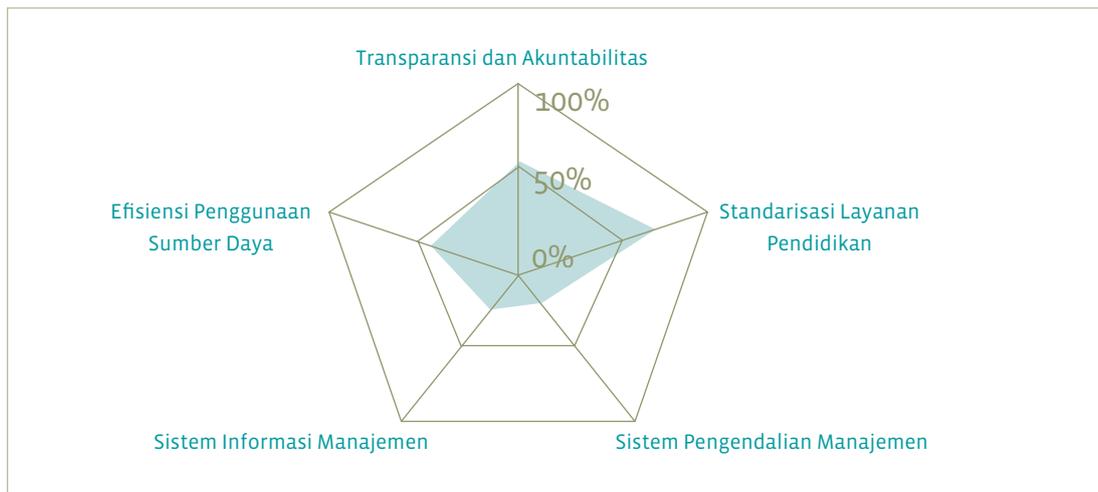
4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Rembang
Provinsi : Jawa Tengah
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		44.52%	25
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	52.98%	13
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	71.67%	4
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	20.83%	40
4.	Sistem Informasi Manajemen	31.70%	24
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45.42%	17

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [8]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

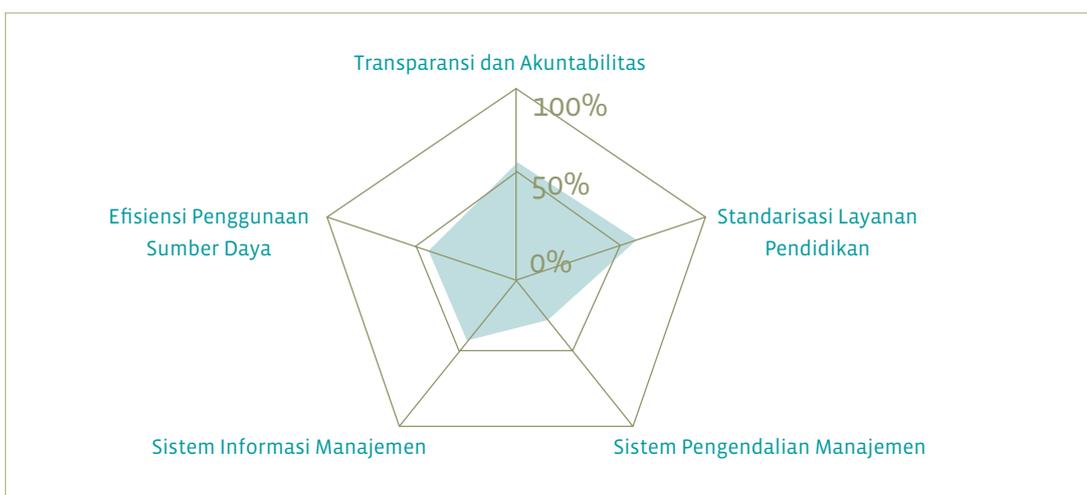
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Demak
Provinsi : Jawa Tengah
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		45.65%	23
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	57.14%	7
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	60.99%	13
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	27.68%	34
4.	Sistem Informasi Manajemen	42.45%	13
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40.00%	24

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

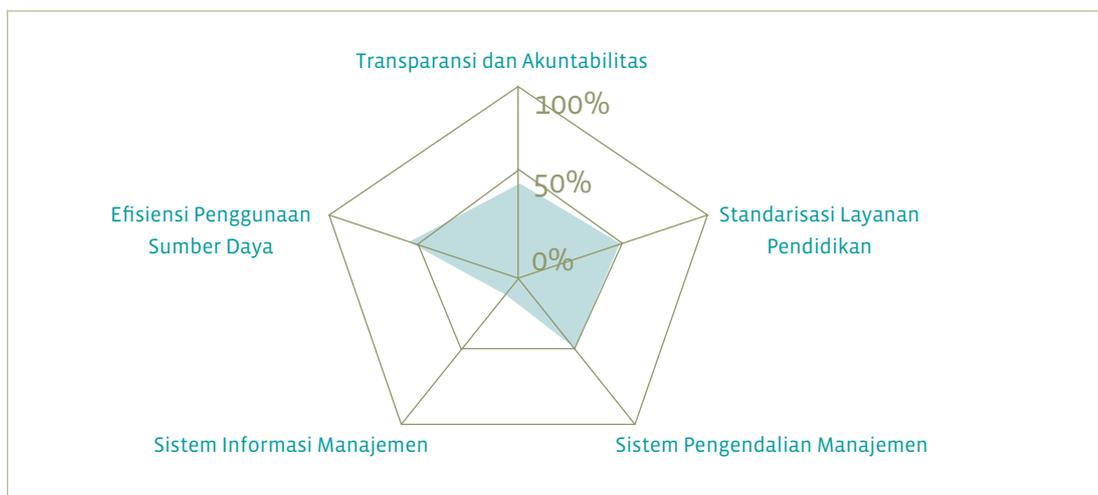
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Brebes
Provinsi : Jawa Tengah
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		44.14%	26
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	44.05%	27
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	49.63%	23
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	49.60%	22
4.	Sistem Informasi Manajemen	12.84%	43
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	64.58%	6

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

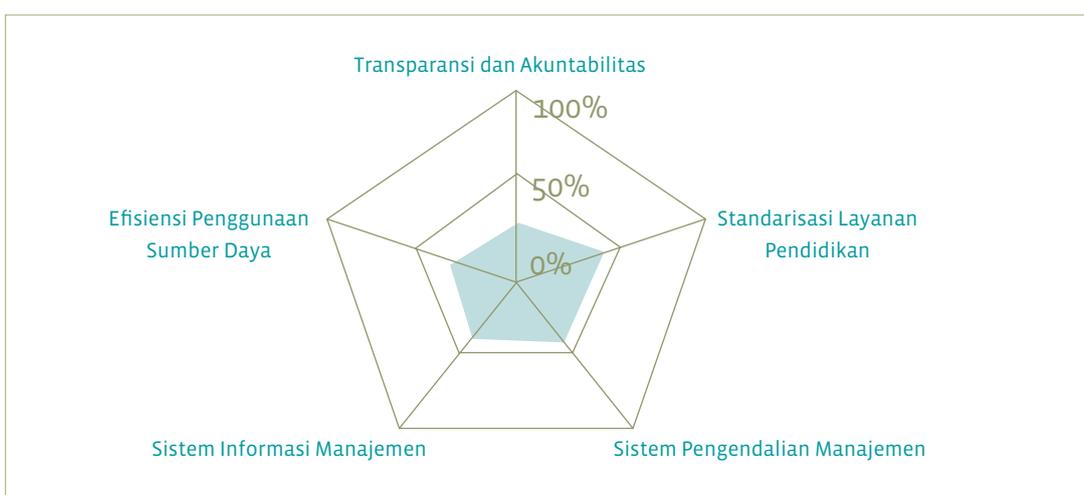
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,o. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,o. [10]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Kulonprogo
Provinsi : Yogyakarta
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		34.52%	38
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	27.38%	42
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	44.91%	30
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	37.40%	30
4.	Sistem Informasi Manajemen	37.50%	20
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25.42%	43

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

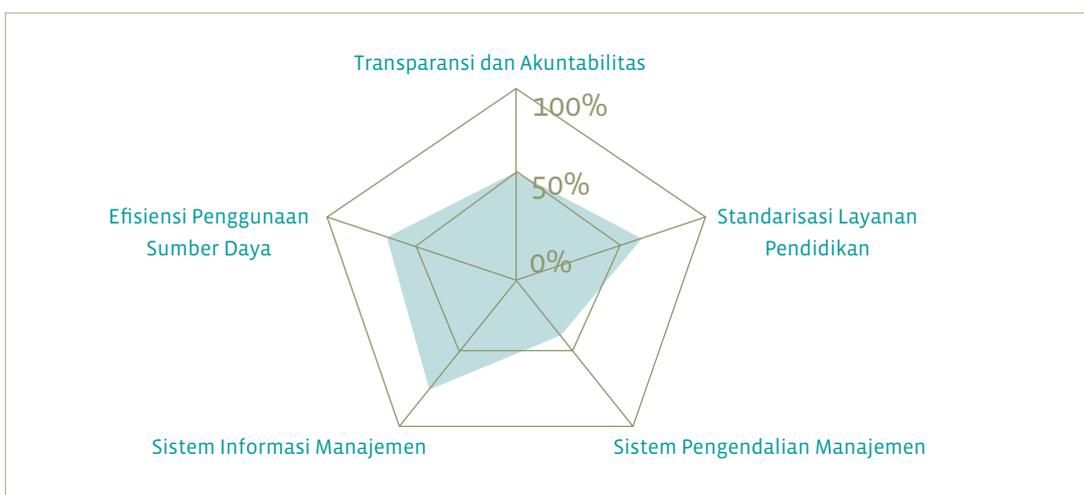
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Sleman
Provinsi : DI Yogyakarta
Kategori : Baik (Hijau)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		61.96%	1
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	54.29%	11
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	64.76%	8
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	40.77%	27
4.	Sistem Informasi Manajemen	77.47%	7
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72.50%	1

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [10]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
Sistem Pengendalian Manajemen	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

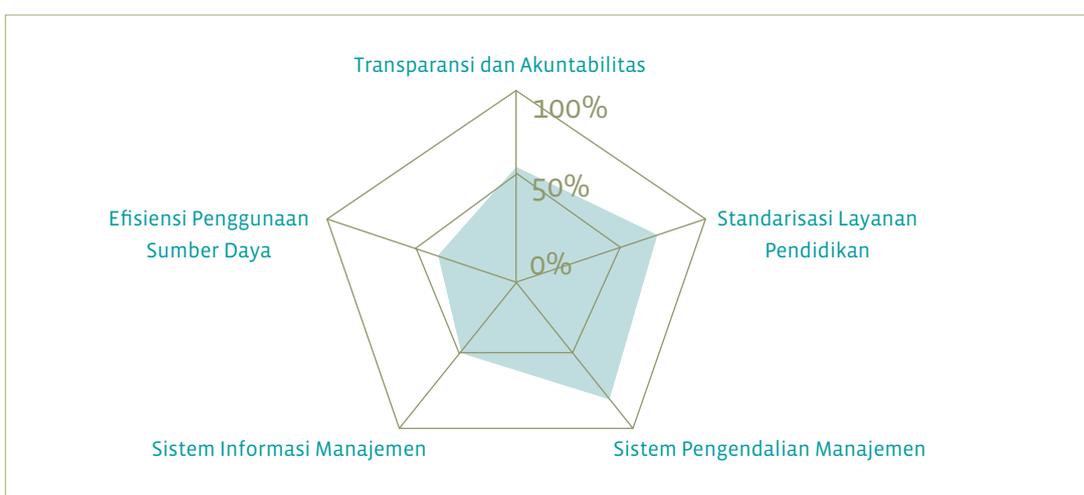
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Pacitan
Provinsi : Jawa Timur
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		58.25%	8
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	56.43%	8
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	70.87%	6
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	78.27%	5
4.	Sistem Informasi Manajemen	46.51%	10
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39.17%	26

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

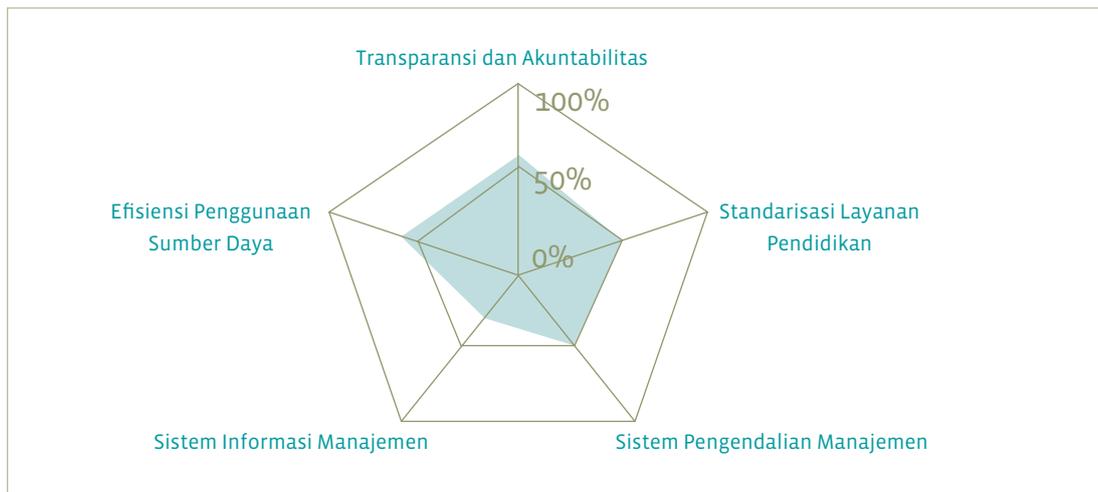
4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Trenggalek
Provinsi : Jawa Timur
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		49.80%	16
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	61.90%	4
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	51.55%	20
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	46.33%	24
4.	Sistem Informasi Manajemen	28.36%	29
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60.83%	10

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

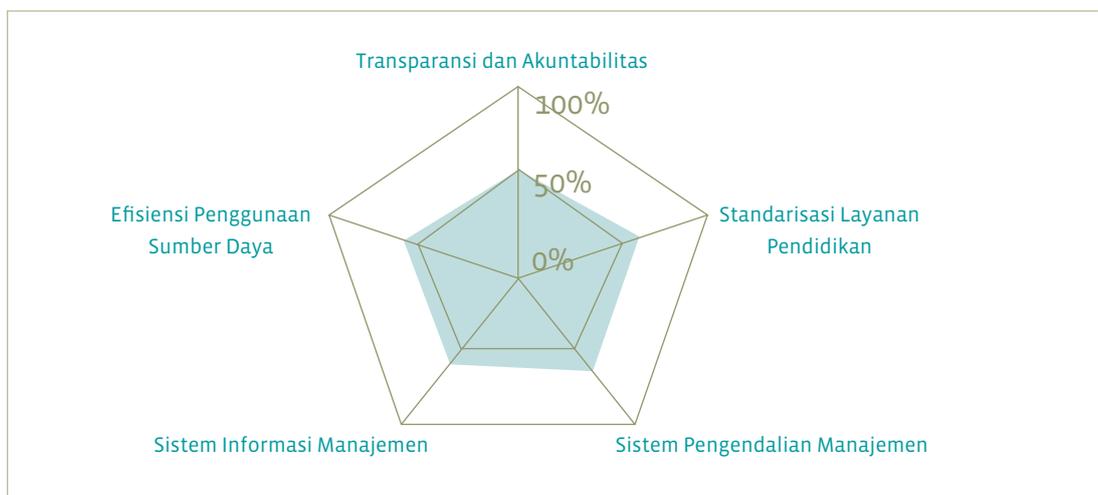
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Bondowoso
Provinsi : Jawa Timur
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		59.38%	4
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	50.71%	15
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	62.78%	10
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	59.13%	21
4.	Sistem Informasi Manajemen	63.03%	4
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61.25%	8

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]	

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [17]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

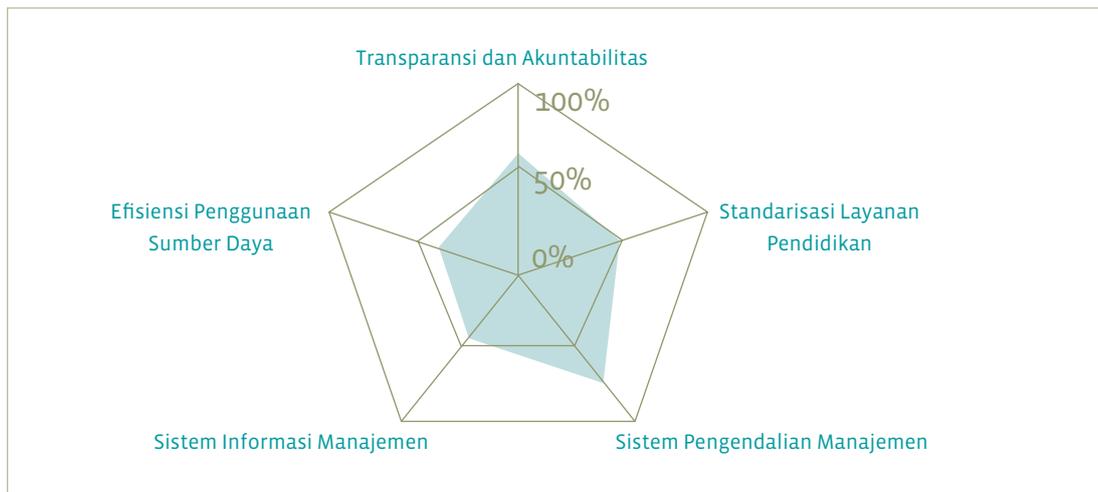
4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Probolinggo
Provinsi : Jawa Timur
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		51.97%	13
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	55.00%	10
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	49.96%	22
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	73.71%	12
4.	Sistem Informasi Manajemen	43.69%	11
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37.50%	30

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
Sistem Pengendalian Manajemen	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

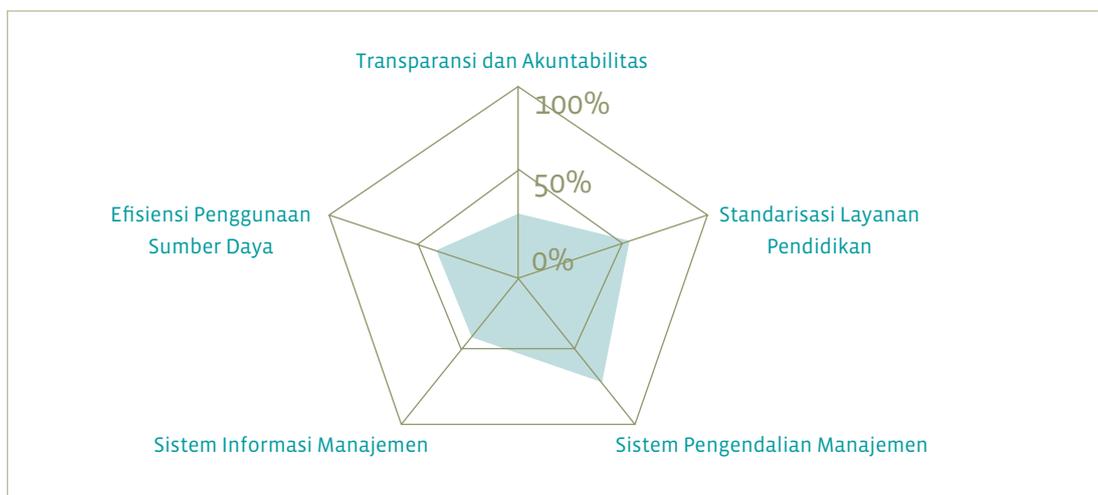
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Jombang
Provinsi : Jawa Timur
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		48.12%	19
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	30.48%	39
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	57.94%	16
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	75.79%	11
4.	Sistem Informasi Manajemen	37.19%	21
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39.17%	28

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

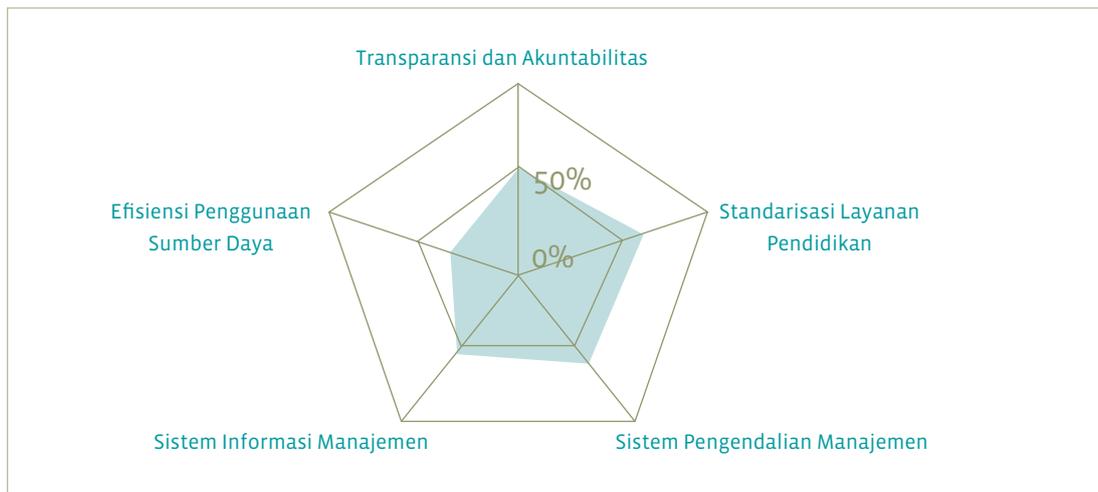
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Nganjuk
Provinsi : Jawa Timur
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		52.55%	19
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	49.29%	39
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	63.86%	16
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	63.59%	11
4.	Sistem Informasi Manajemen	54.74%	21
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31.25%	28

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
Standarisasi Layanan Pendidikan	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

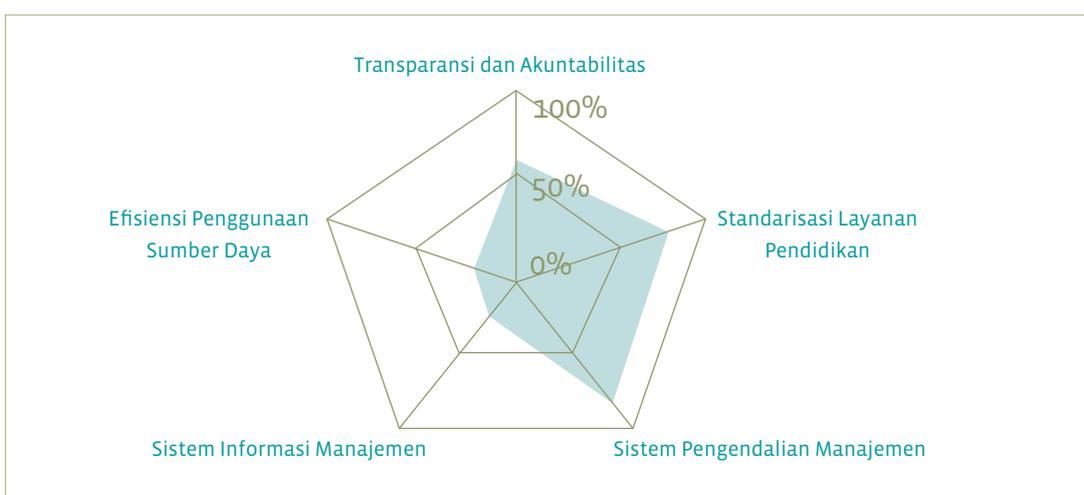
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang.
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		53.71%	11
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	61.43%	6
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	76.82%	3
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	83.23%	2
4.	Sistem Informasi Manajemen	25.00%	33
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22.08%	46

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
Sistem Pengendalian Manajemen	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK.
	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Bidang Strategis	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

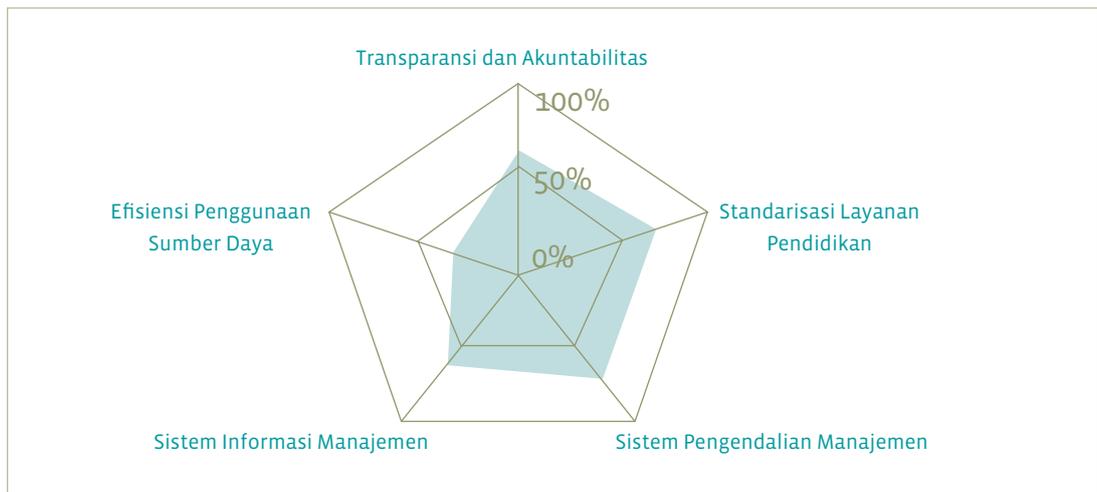
4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Bojonegoro
Provinsi : Jawa Timur
Kategori : Baik (Hijau)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		60.45%	2
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	63.10%	2
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	71.58%	5
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	76.91%	8
4.	Sistem Informasi Manajemen	61.94%	5
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28.75%	42

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

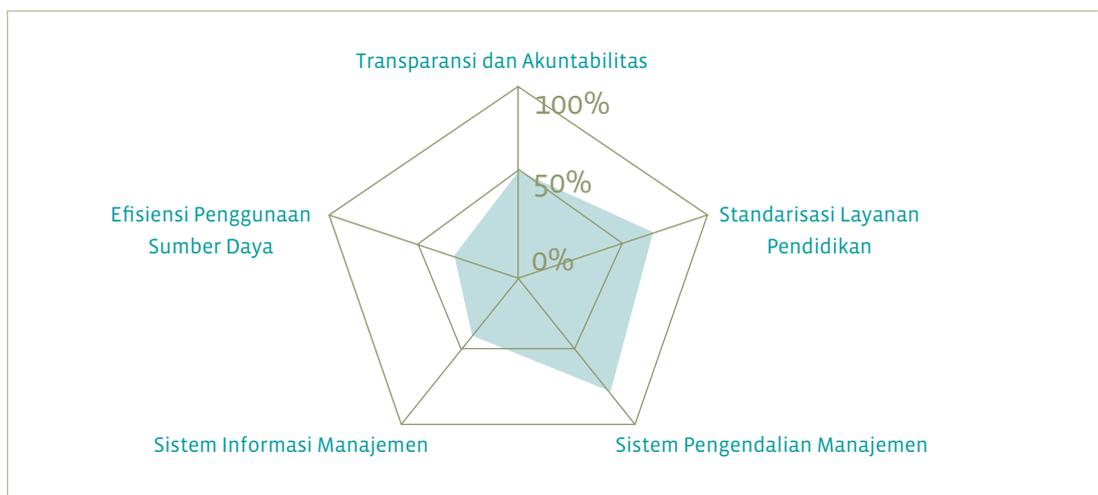
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs.[11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Bangkalan
Provinsi : Jawa Timur
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		51.06%	15
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	45.71%	22
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	62.53%	11
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	78.27%	6
4.	Sistem Informasi Manajemen	38.78%	19
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30.00%	40

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

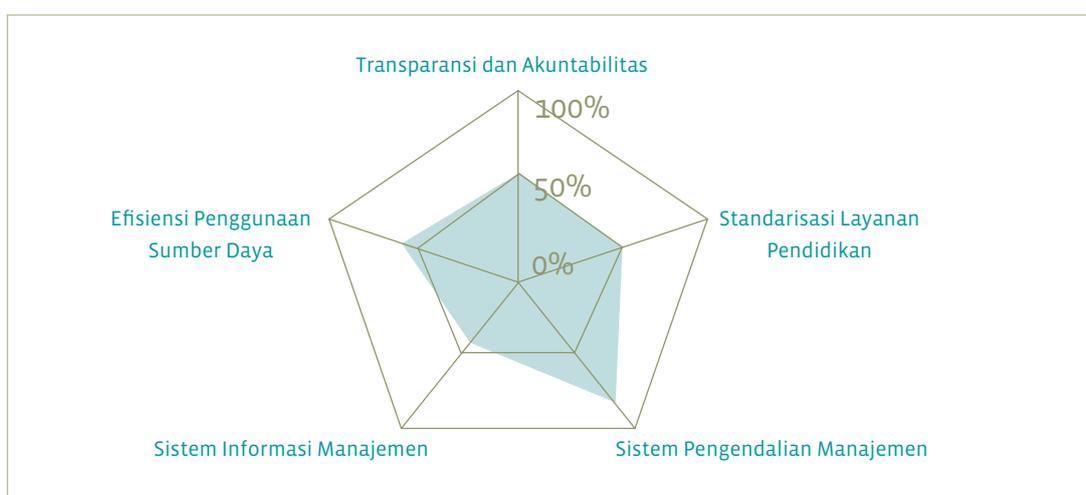
4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Sampang
Provinsi : Jawa Timur
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		57.02%	9
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	47.62%	21
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	54.46%	19
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	82.19%	3
4.	Sistem Informasi Manajemen	41.67%	15
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59.17%	11

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD, [2]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

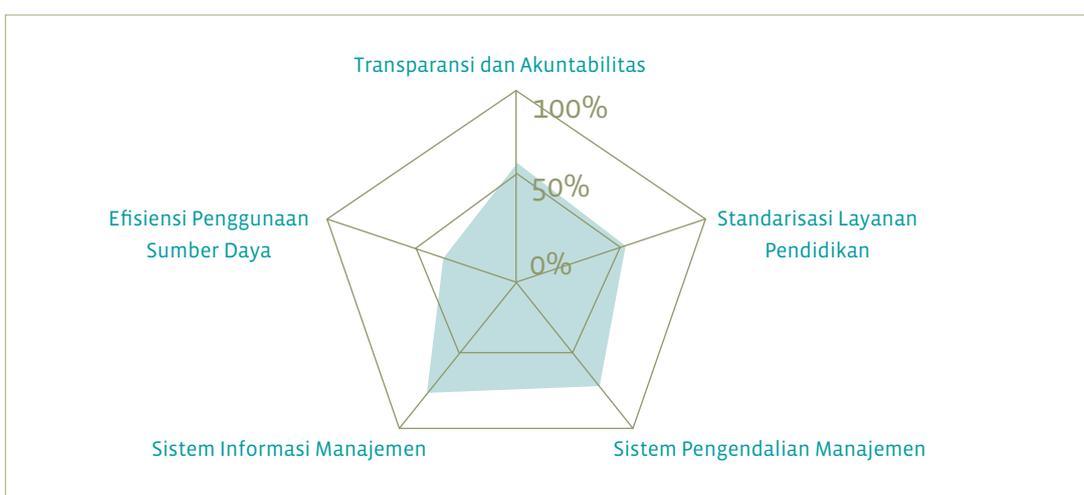
Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Probolinggo (Kota)

Provinsi : Jawa Timur

Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		58.72%	7
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	61.43%	5
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	50.94%	21
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	72.62%	13
4.	Sistem Informasi Manajemen	73.60%	2
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35.00%	31

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

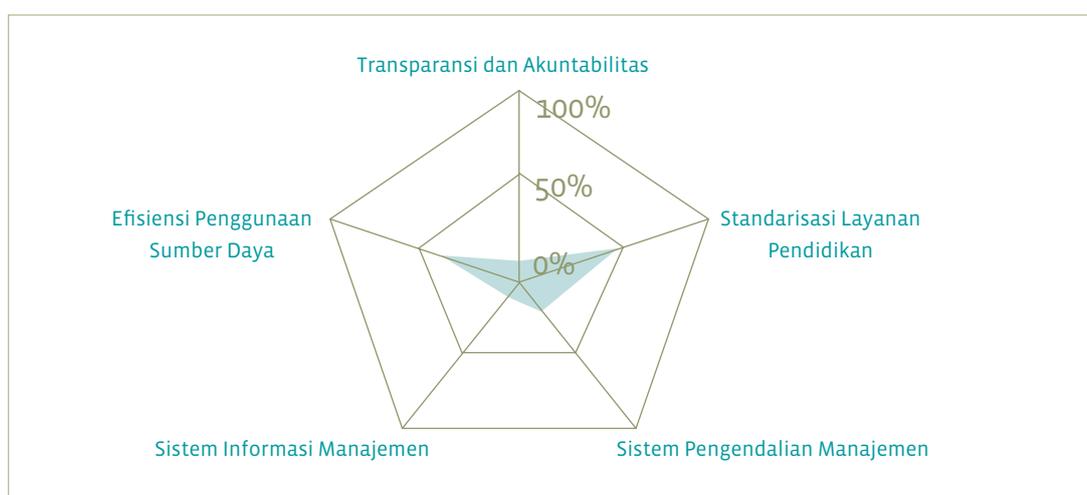
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Kotawaringin Timur
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		21.60%	47
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	10.24%	49
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	44.90%	31
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	10.02%	50
4.	Sistem Informasi Manajemen	4.49%	48
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38.33%	29

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

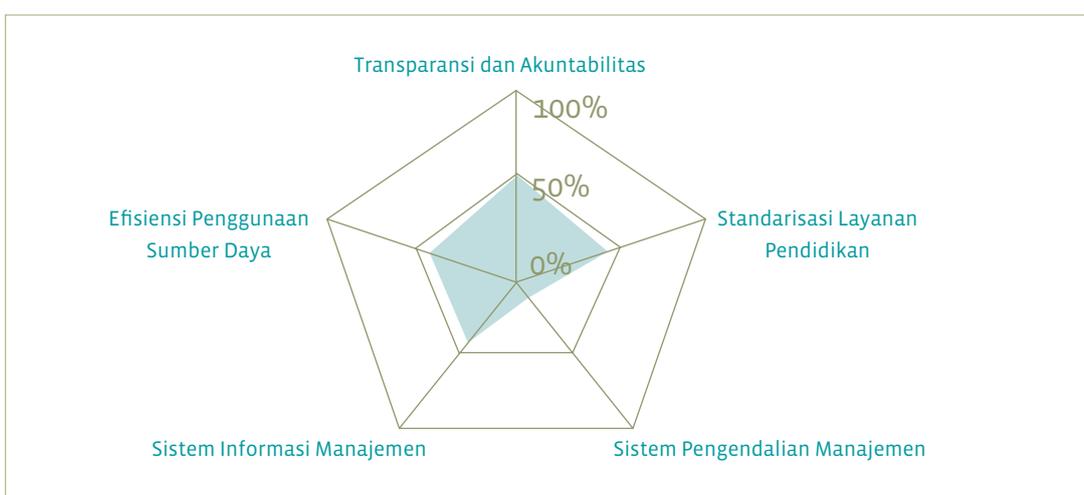
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]	
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Seruyan
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kategori : Kurang (Murah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		36.84%	34
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	45.71%	23
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	43.89%	33
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	12.10%	47
4.	Sistem Informasi Manajemen	41.67%	16
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40.83%	22

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

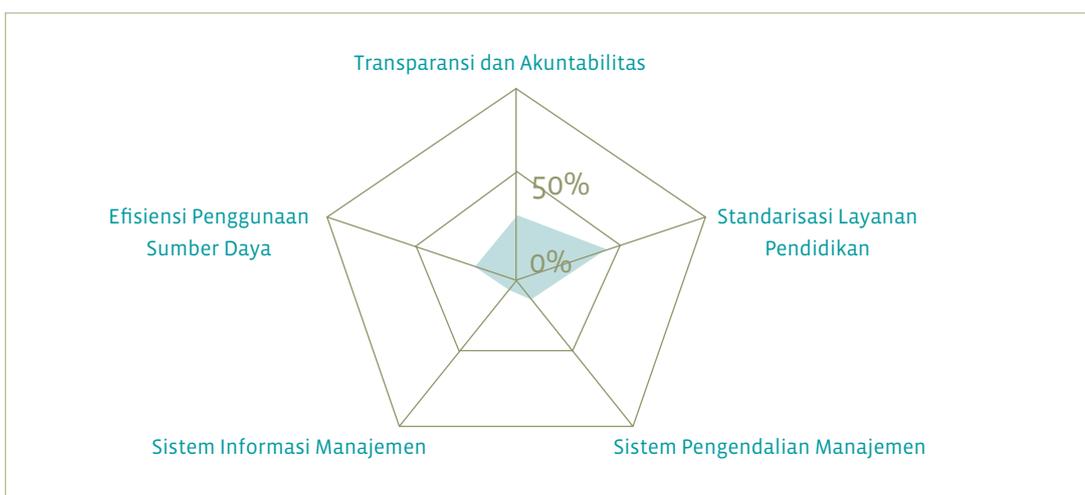
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Palangkaraya
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		22.12%	46
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	28.69%	41
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	41.84%	38
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	13.19%	46
4.	Sistem Informasi Manajemen	5.23%	45
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21.67%	47

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efficient Resource Use	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

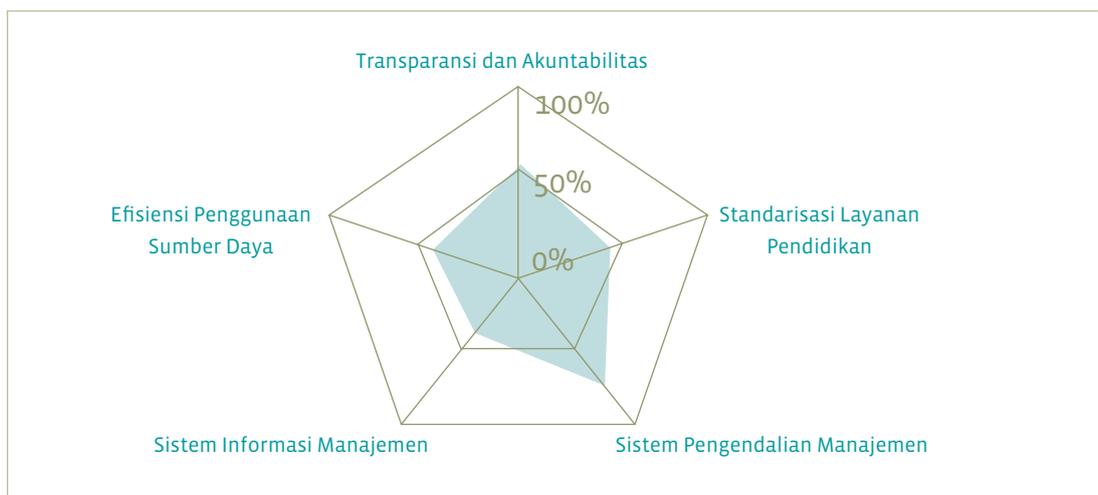
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Majene
Provinsi : Sulawesi Barat
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		49.74%	17
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	52.38%	14
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	44.51%	32
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	77.68%	7
4.	Sistem Informasi Manajemen	33.71%	23
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40.42%	23

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [13]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [8]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten.
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

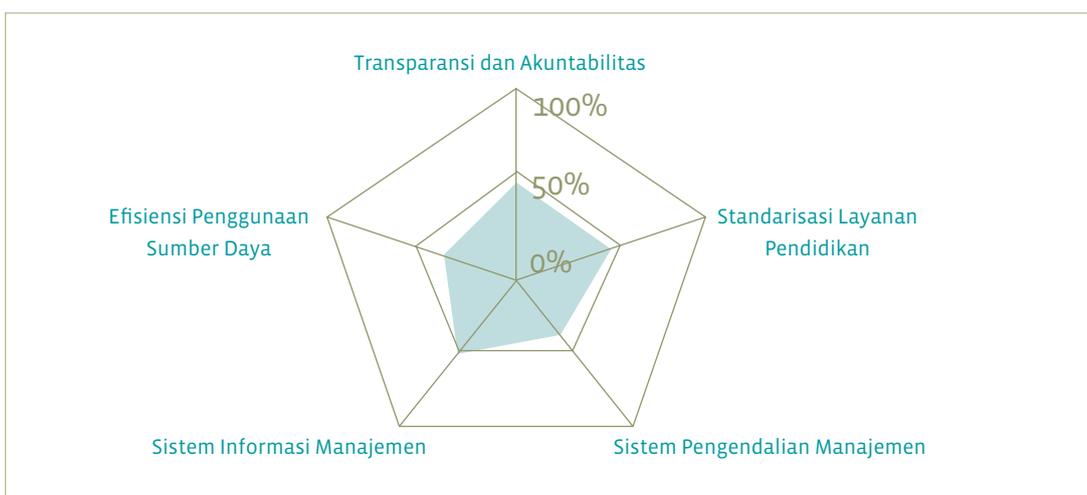
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Polewali Mandar
Provinsi : Sulawesi Barat
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		42.24%	28
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	44.05%	28
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	43.02%	35
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	38.29%	28
4.	Sistem Informasi Manajemen	51.65%	9
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34.17%	33

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

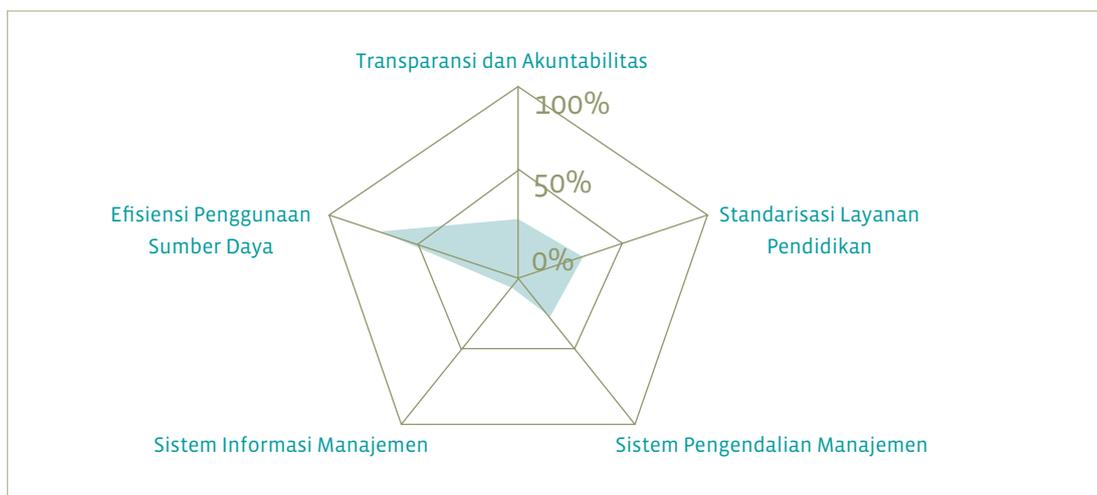
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Mamasa
Provinsi : Sulawesi Barat
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		29.90%	43
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	23.33%	45
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	23.37%	48
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	27.58%	35
4.	Sistem Informasi Manajemen	4.37%	49
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70.83%	2

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

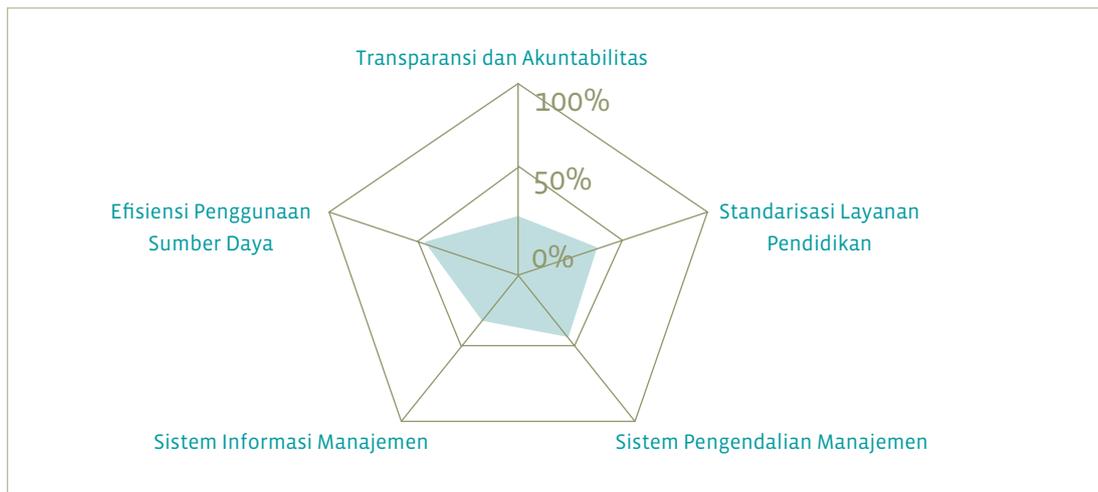
Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Kepulauan Sula
Provinsi : Maluku Utara
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		36.49%	35
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	25.48%	44
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	34.86%	43
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	45.59%	26
4.	Sistem Informasi Manajemen	30.30%	27
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46.25%	16

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

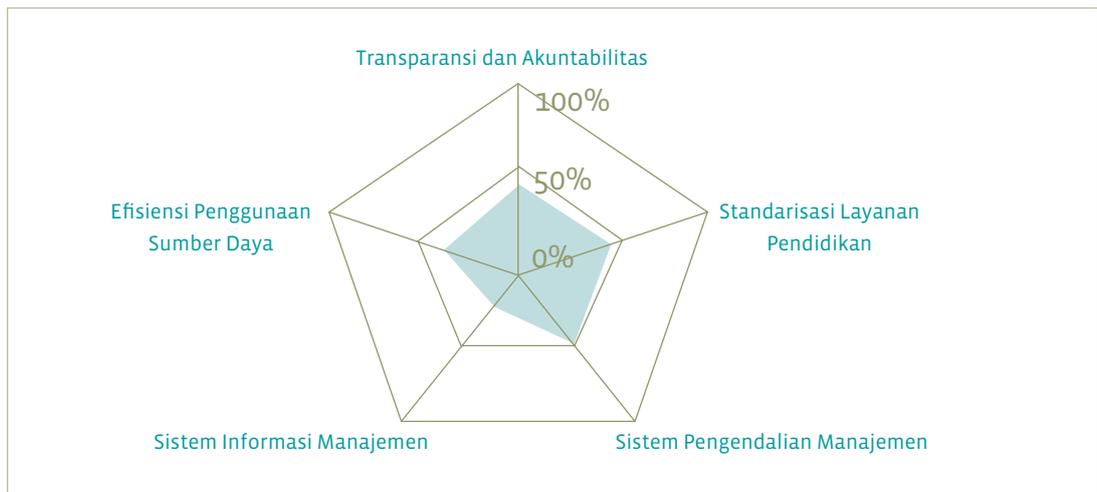
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Halmahera Selatan
Provinsi : Maluku Utara
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		34.52%	37
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	37.62%	38
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	37.11%	41
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	45.81%	25
4.	Sistem Informasi Manajemen	20.83%	39
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31.25%	37

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [6]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

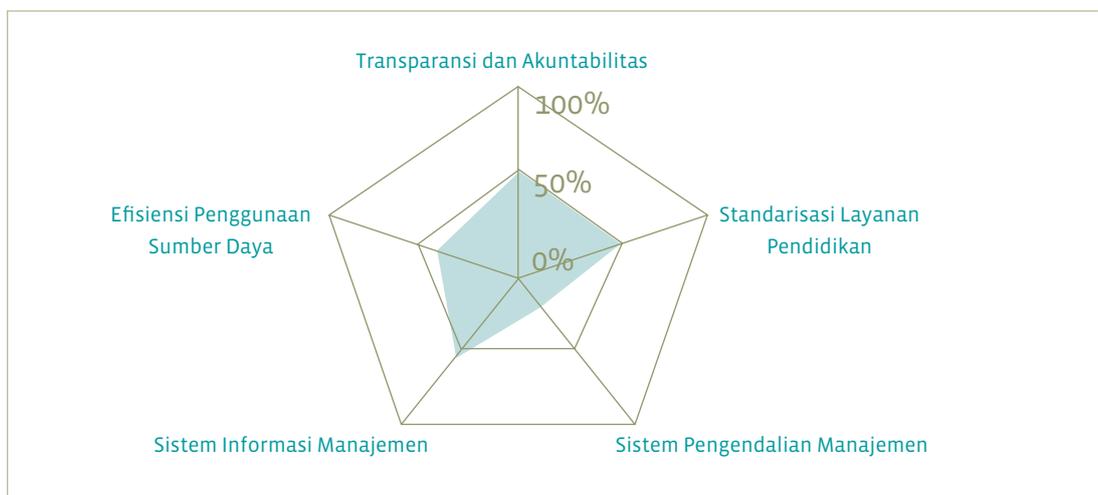
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Ternate
Provinsi : Maluku Utara
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		41.94%	29
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	49.29%	18
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	48.26%	25
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	18.43%	42
4.	Sistem Informasi Manajemen	54.56%	8
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39.17%	25

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

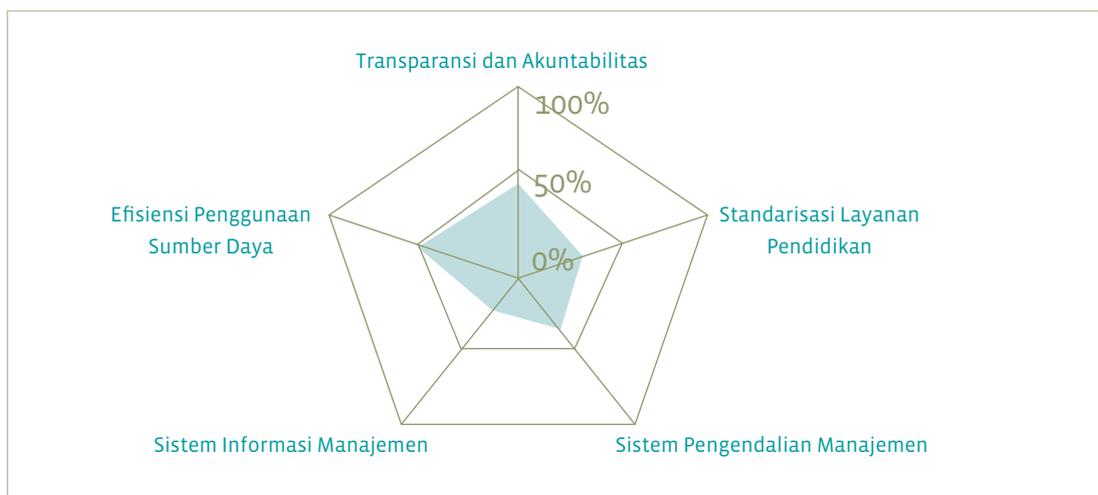
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Kaimana
Provinsi : Papua Barat
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		35.65%	36
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	40.48%	37
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	28.76%	46
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	36.11%	31
4.	Sistem Informasi Manajemen	21.68%	37
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51.25%	15

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

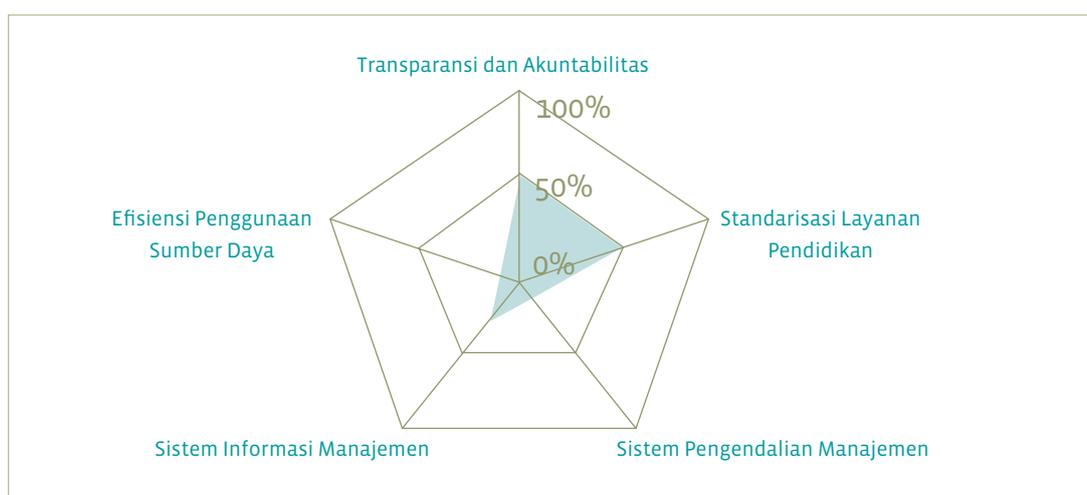
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]	
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Teluk Wondama
Provinsi : Papua Barat
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		29.70%	44
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	49.29%	19
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	47.60%	27
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	11.61%	48
4.	Sistem Informasi Manajemen	29.17%	28
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	10.83%	50

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
Standarisasi Layanan Pendidikan	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
Sistem Pengendalian Manajemen	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

172

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

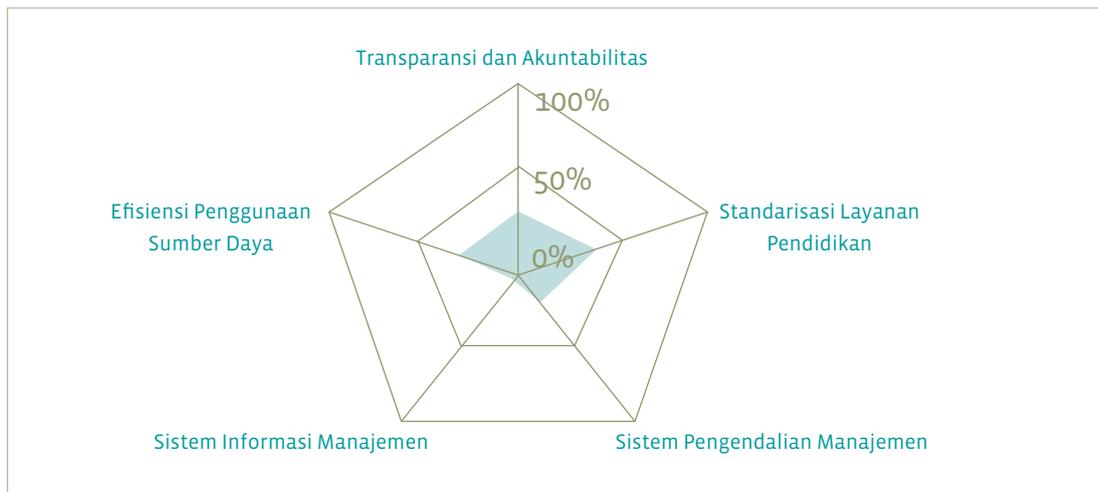
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Manokwari
Provinsi : Papua Barat
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		22.48%	45
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	27.38%	43
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	36.59%	42
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	17.36%	43
4.	Sistem Informasi Manajemen	0.65%	50
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30.42%	38

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
Sistem Pengendalian Manajemen	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [6]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

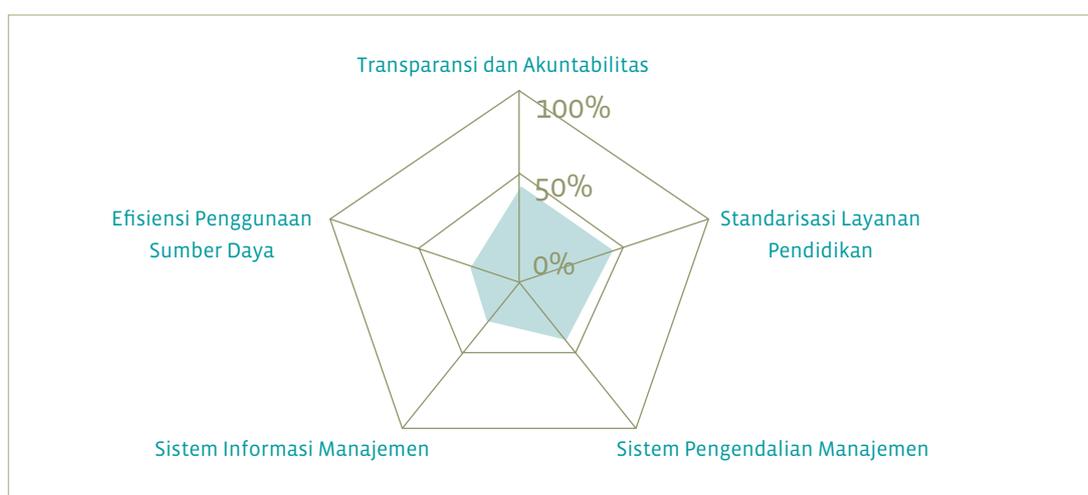
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,o. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,o. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Sorong Selatan
Provinsi : Papua Barat
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		34.50%	39
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	41.67%	32
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	42.63%	36
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	37.90%	29
4.	Sistem Informasi Manajemen	26.97%	32
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23.33%	45

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Pengendalian Manajemen	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

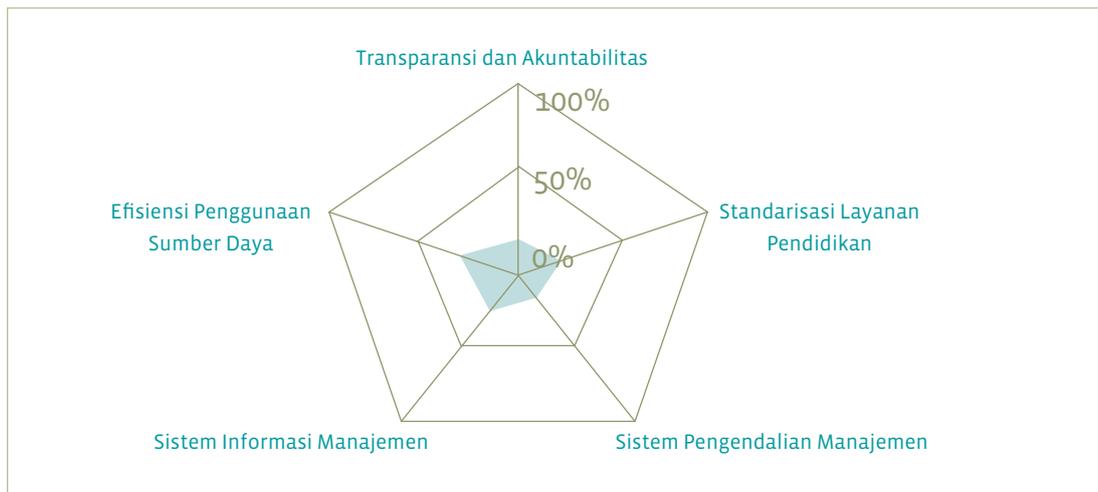
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]	
Sistem Informasi Manajemen	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Jayawijaya
Provinsi : Papua
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		21.02%	48
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	16.67%	47
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	19.49%	49
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	14.19%	45
4.	Sistem Informasi Manajemen	24.32%	34
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30.42%	39

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
Sistem Pengendalian Manajemen	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [6]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [6]
Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]	

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

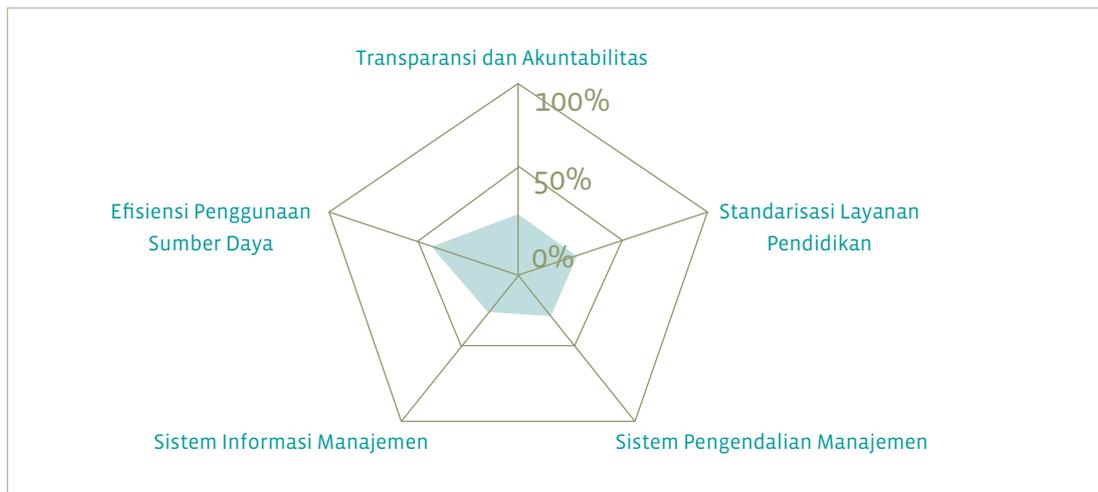
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,o. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,o. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Nabire
Provinsi : Papua
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		31.72%	40
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	30.48%	40
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	27.46%	47
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	29.69%	32
4.	Sistem Informasi Manajemen	27.21%	31
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43.75%	20

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [6]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

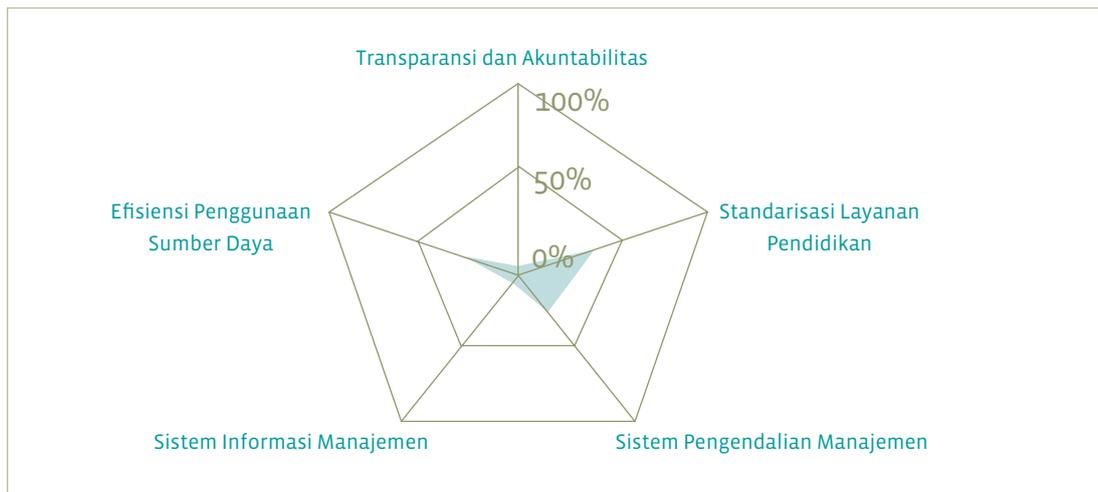
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Paniai
Provinsi : Papua
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		19.08%	50
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	3.57%	50
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	33.93%	44
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	24.11%	37
4.	Sistem Informasi Manajemen	4.61%	47
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29.17%	41

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
Sistem Pengendalian Manajemen	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Strategic Areas	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
Sistem Informasi Manajemen	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur.[3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]	

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

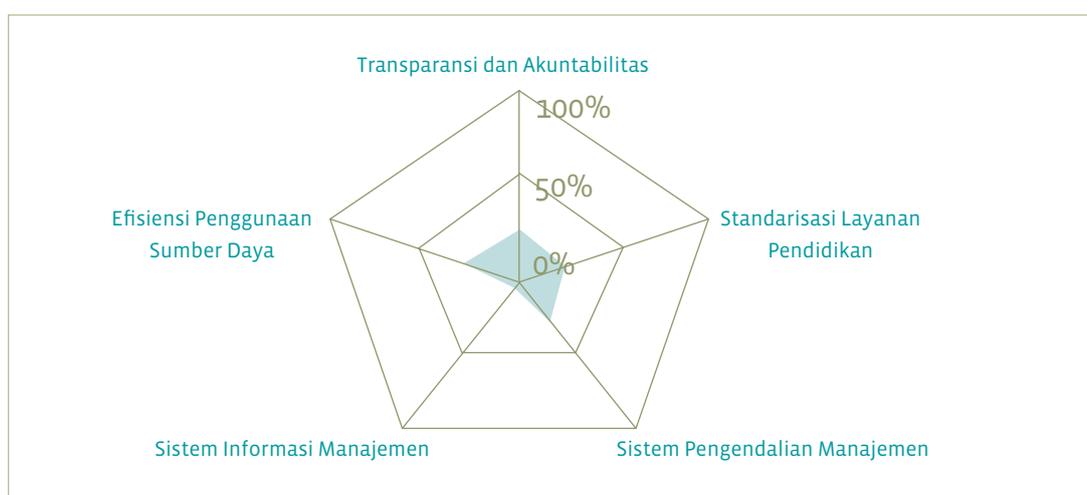
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]	
Standarisasi Layanan Pendidikan	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]
	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]	
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Pegunungan Bintang
Provinsi : Papua
Kategori : Kurang (Merah)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		19.08%	49
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	22.02%	46
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	18.90%	50
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	24.11%	38
4.	Sistem Informasi Manajemen	4.96%	46
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25.42%	44

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [6]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

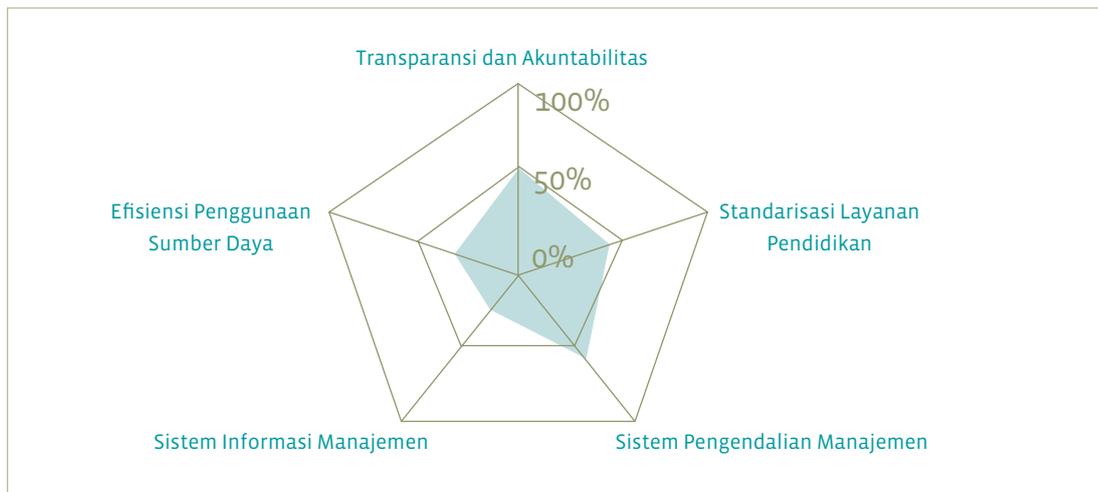
Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [8]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

Hasil Survei Penilaian Kapasitas Pemerintah Daerah (LGCA)

Kabupaten : Jayapura
Provinsi : Papua
Kategori : Sedang (Kuning)

Nilai LGCA Berdasarkan Bidang Strategis



URAIAN		NILAI	PERINGKAT dari 50 pemerintah daerah
Nilai Keseluruhan (Indeks Tata Kelola Pendidikan)		42.88%	27
Bidang Strategis:			
1.	Transparansi dan Akuntabilitas	48.81%	20
2.	Standarisasi Layanan Pendidikan	45.52%	29
3.	Sistem Pengendalian Manajemen	59.90%	19
4.	Sistem Informasi Manajemen	28.10%	30
5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32.08%	35

1. Faktor Kekuatan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [3]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]
	Memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD Pendidikan, sekolah, Dewan Pendidikan dll. [10]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SMP/MTs, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [1]
	Minimal 75% dari jumlah pengawas SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari program studi yang terakreditasi. [5]
	Angka putus sekolah (SD/MI) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [7]
	Angka putus sekolah (SMP/MTs) tidak melebihi 1% dari jumlah siswa yang bersekolah. [8]
Sistem Pengendalian Manajemen	Forum diskusi SKPD Pendidikan memasukkan saran/usulan kegiatan kependidikan dari hasil Musyawarah Rencanan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan. [6]
	Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam perencanaan pendidikan. [8]
	Memiliki struktur untuk memberdayakan (pelatihan, pembinaan profesional dll) para anggota Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. [15]
	Daerah memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik terkait dengan peningkatan pelayanan pendidikan dasar. [14]
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat pangkalan data pendidikan di tingkat kabupaten/kota. [1]
	Aplikasi PAS (Paket Aplikasi sekolah), JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional), PADATI (Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan). [4]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dewan Pendidikan terlibat dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Pendidikan. [2]
	Kebijakan umum APBD mencakup indikator hasil yang dapat diukur. [3]
	Prioritas dan plafon anggaran disusun sebelum proses penganggaran di SKPD dimulai. [4]
	Kalender perencanaan dan anggaran SKPD telah disusun. [5]
	Renstra dan Renja SKPD memuat pagu indikatif (proyeksi biaya) dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. [6]
	Program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan di SKPD diakomodasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. [7]
	SKPD memiliki catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran. [9]

2. Faktor Kekuatan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kekuatan yang Dominan
Sistem Pengendalian Manajemen	Pengguna barang melakukan inventarisasi persediaan sekali setahun. [1]
	Terdapat SK Kepala Dinas yang mengatur organisasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas, Sub Dinas, UPT dan Sub UPT. [16]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dokumen perencanaan dan penganggaran mudah diakses oleh masyarakat. [12]

3. Faktor Kelemahan Secara Spesifik

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI dan SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SMP (D-IV/S1) dari program studi yang terakreditasi. [3,4]
Sistem Pengendalian Manajemen	Tender pengadaan barang dan jasa telah direncanakan dengan baik sehingga tidak terkesan adanya pemecahan paket-paket untuk menghindari pelelangan. [10]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan aset daerah dalam 3 tahun terakhir secara berkala. [1]
	Program dan kegiatan dalam RPJMD dapat diukur secara kuantitatif. [10]

4. Faktor Kelemahan Secara Umum

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Transparansi dan Akuntabilitas	Laporan keuangan dipublikasikan, misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui situs web. [1]
	Masyarakat dapat menghadiri sidang DPRD yang membahas laporan pertanggungjawaban dan hasil audit BPK. [2]
	Peraturan perundangan daerah mengenai transparansi telah disahkan. [4]
	Peraturan perundangan daerah mengenai partisipasi telah disahkan. [5]
	Masyarakat memiliki akses terhadap sidang-sidang DPRD mengenai APBD. [2]
	Pembahasan tentang laporan akuntabilitas dalam sidang DPRD terbuka untuk umum. [7]
	Masyarakat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di SKPD Pendidikan. [8]
Standarisasi Layanan Pendidikan	Di setiap SD/MI, minimal 40% dari jumlah guru memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. [2]
	Minimal 75% dari jumlah kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) dari program studi yang terakreditasi. [3]
	95% dari jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. [6]

Bidang Strategis	Faktor Kelemahan yang Dominan
Standarisasi Layanan Pendidikan	Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI 6,0. [9]
	Nilai rata-rata ujian nasional SMP/MTs 6,0. [10]
	90% dari jumlah lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs. [11]
	Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke sekolah SMA/MA atau SMK. [12]
Sistem Pengendalian Manajemen	Terdapat Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa. [2]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi guru SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). [3]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Pengawas SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [4]
	Memiliki struktur insentif dan sanksi berbasis kinerja bagi Kepala SD/MI dan SMP/MTs yang mengacu pada BSNP. [5]
	SKPD mempertimbangkan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dalam proses penyusunan RENJA SKPD Pendidikan. [7]
	Semua rekening yang digunakan merupakan rekening kas daerah. [11]
	Terdapat bukti keberadaan yang jelas dari sistem yang sistematis untuk memvalidasi tata kelola yang baik (Perda, evaluasi terstruktur untuk praktek inovatif, prosedur diseminasi dan dokumentasi). [12]
	Terdapat pangkalan data berbasis IT atau metode lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mendokumentasi inovasi berhasil guna. [14]
	Terdapat pemangku kepentingan yang secara khusus mengelola sistem jejaring untuk penyebarluasan inovasi yang berhasil guna. [15]
Terdapat Perda mengenai pengelolaan barang. [17]	
Sistem Informasi Manajemen	Terdapat dokumen yang menggambarkan prosedur dan penjadwalan yang harus dilakukan untuk pengumpulan data, pembersihan data, dan pengiriman data (dari sekolah) ke kabupaten. [2]
	Terdapat proses pengecekan data (dari suatu sampel) untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. [3]
	Persentase sekolah yang memiliki komputer yang berfungsi. [5]
	Persentase sekolah yang memiliki koneksi internet. [6]
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Perbedaan antara total anggaran belanja dengan realisasi APBD tahun lalu kurang dari 10%. [11]
	Tingkat penyerapan anggaran pendidikan pada bulan Desember 2008 mencapai 90% atau lebih. [12]

